

**IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PENINGKATAN MUTU DI SMPN 3 TRIENGGADENG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**FURQANISAH
NIM. 170206068**

**Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Manajemen Pendidikan Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PENINGKATAN MUTU SMPN 3 TRIENGGADENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Pendidikan Islam**

Oleh

FURQANISAH

NIM. 170206068

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Yusri. M. Daud, M.Pd
NIP. 1959070219900331001

Pembimbing II,



Lailatussaadah, M.Pd
NIP. 19751227007012014

**IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PENINGKATAN MUTU DI SMPN 3 TRIENGGADENG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Pada Hari//Tanggal : **Senin,** 29 Juli 2021
19 Zulhijah 1442

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Yusri M. Daud, M.Pd
NIP. 196303031983031003

Sekretaris,

Nurussalami, S. Ag, M.Pd
NIP. 197902162014112001

Penguji I,

Dr. Basidin Mizal, M.Pd
NIP. 1959070219900331001

Penguji II,

Latatussaadah, M.Pd
NIP. 19751227007012014

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Muslim Razali, SH, M. Ag
NIP. 196903091989031001

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Furqanisah
NIM : 170206068
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di SMPN 3 Trienggadeng adalah benar karya asli saya, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Furqanisah

ABSTRAK

Nama : Furqanisah
NIM : 170206068
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Di SMPN 3 Trienggadeng
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Drs. Yusri M. Daud, M.Pd
Pembimbing II : Lailatussadah, M.Pd
Kata Kunci : Standar Pengelolaan Pendidikan, Mutu, Pelibatan, Membangun Kemitraan, Kerjasama.

Kurangnya implementasi standar pengelolaan pendidikan telah menyakibatkan rendahnya mutu pendidikan pada beberapa aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi analisis masalah dan analisis kebutuhan terhadap standar pengelolaan pendidikan di SMPN 3 Trienggadeng, untuk membuat rancang bangun langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di SMPN 3 Trienggadeng, untuk menguji validitas rancang bangun langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di SMPN 3 Trienggadeng. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D (*Define, Design, Development, Dissemination*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa analisis masalah dan analisis kebutuhan nilai akreditasi standar pengelolaan pendidikan pada pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan di SMPN 3 Trienggadeng masih rendah, terdapat hanya 4 pelibatan pada komponen tersebut, oleh karena itu dibutuhkan sebuah rancang bangun langkah-langkah pengembangan terhadap standar pengelolaan pendidikan pada 2 aspek lainnya yakni aspek kerjasama dengan pihak DUDI pihak Bakat Minat. Tahapan rancang bangun langkah-langkah pengembangan pada standar pengelolaan pendidikan aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan Bakat Minat dilakukan dengan 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil uji validitas rancang bangun langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan pada aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan Bakat Minat yang divalid oleh 3 dosen ahli diperoleh presentase 93,7%. Hasil kemenarikan langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan pada aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan Bakat Minat diperoleh rata-rata skor 4 dengan kriteria "Sangat Baik". Demikian rancang bangun langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan pada aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat dapat diterapkan guna untuk dapat meningkatkan mutu di SMPN 3 Trienggadeng.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan membersihkan diri dari kesalahan sehingga menjadi lebih bersih dan lebih dekat kepada-Nya. Dengan kekuatan-Nya juga penulis telah dapat menyelesaikan kegiatan karya tulis yang tertuang dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di SMP 3 Trienggadeng”**. Shalawat beriring salam penulis alamatkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW dimana beliau telah susah payah merubah pola pikir umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dan juga kepada para sahabat dan alim ulama yang bersama-sama memperjuangkan agama yang paling sempurna jika dibandingkan dengan agama yang lain di muka bumi ini. Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil Alamin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas studi untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Muslim Razali, S.H.,M.Ag. selaku Dekan Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

2. Mumtazul Fikri M.A. selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
3. Drs. Yusri M. Daud, M.Pd selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Lailatussaadah, M.Pd, S.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah yang telah menyediakan bahan referensi dalam penelitian ini.
6. Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMPN 3 Trienggadeng Pidie Jaya yang sudah bersedia memberikan izin kepada peneliti, memberikan keterangan, informasi, dan data untuk keperluan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa terlalu banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal'alamin

Banda Aceh, 12 Juni 2021
Penulis,

Furqanisah
NIM. 170206068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Standar Pengelolaan Pendidikan	9
1. Standar Pengelolaan berdasarkan UUD	9
2. Kerangka Standar pengelolaan Pendidikan (Permendiknas No 19 Tahun 2007).....	9
B. Mutu Sekolah	21
1. Pengertian Mutu	21
2. Komponen Mutu Pendidikan.....	23
3. Penjaminan Mutu.....	24
C. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	35
A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
B. Karakteristik Sasaran Penelitian	35
C. Metode Penelitian.....	35
D. Model Pengembangan	36
E. Prosedur Pengembangan	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Sekolah	45
B. Pembahasan Penelitian.....	46
C. Pembahasan Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data *The Learning Curve Pearson* 2014, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia memaparkan Indonesia menduduki posisi akhir dalam mutu pendidikan diseluruh dunia dengan indeks ranking dan nilai secara keseluruhan minus 1,84.¹ Hal yang sama juga dipaparkan oleh Rektor Uiversitas Syiah Kuala Banda Aceh Samsul Rizal yang juga sebagai Wakil Ketua I LMPT 2020 berdasarkan hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) 2020 Aceh menduduki posisi skor terendah secara nasional. Uraian tersebut jelas terlihat bahwa mutu pendidikan masyarakat Aceh jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.²

Menurut Komisi Nasional Pendidikan, mutu berkenaan dengan perilaku sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan standar ini dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran sekolah yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang

¹BAPPEDA ACEH, "*Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh 2015*," 2015.

²M. Syabri Majid, "Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh," *Jurnal Pemecahan* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.13170/jp.8.1.2040>.

bersifat kualitatif khusus-nya untuk bidang-bidang pendidikan agama, budi pekerti, moral, dan sebagainya”³

Ruang lingkup mutu sekolah meliputi mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu (1) input, baik input peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain, (2) proses, baik proses manajemen sekolah maupun proses pembelajaran dan penilaian, (3) produk dan hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu sistem secara keseluruhan, dan (4) *outcomes*, terutama penjaminan mutu mengenai relevansi kualitas lulusan dari suatu satuan pendidikan dengan kebutuhan.⁴

Menurut Feiby Ismail, dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi penjaminan mutu ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama nomor 66 Tahun 2016 tentang penyelenggara pendidikan Madrasah. Untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah membuat peraturan rutin untuk mengevaluasi sejauh mana program-program peningkatan mutu berjalan. Upaya penjaminan mutu dengan memberikan tugas atau delegasi tugas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada bidang-bidang dan person tertentu untuk menutupi ketiadaan unit lembaga penjaminan mutu.⁵

³Isep Djuanda, “Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah,” *Kordinat* 18, no. 1 (2019): 1–22.

⁴Ade Cahyana, “Upaya Peningkatan Mutu Melalui Otonomi Satuan Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16 (2010): 109–17, <https://media.neliti.com/media/publications/121594-ID-upaya-peningkatan-mutu-sekolah-melalui-s.pdf>.

⁵Feiby Ismail, “Implementasi Penjaminan Mutu Di Lembaga Pendidikan Islam ; Dan MAN 1 Kota Bitung,” *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 2 (2020): 78–95.

Ari Prayoga, menemukan mutu yang harus dimiliki sekolah adalah; 1) menjunjung tinggi nilai moral, 2) hasil ujian yang sangat memuaskan, 3) dukungan dari orang tua, tempat usaha dan lingkungan sekitar, 4) sumber daya yang melimpah, 5) kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi, misi yang jelas, 6) kepedulian dan perhatian terhadap peserta didik, 8) kurikulum yang seimbang dan relevan.⁶

Saat ini persaingan antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dapat dihindari, banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam lingkup sempit membuat persaingan semakin ketat. Hal ini menjadi masalah bagi SMP yang kalah bersaing dimana mereka akan kesulitan untuk mendapatkan peserta didik baru yang diharapkan. Namun, bagi sekolah yang sudah siap dan mampu bersaing pasti akan mendapatkan target yang diharapkan, bahkan lebih. Orang tua peserta didik biasanya melihat dan mengukur baik atau tidak sekolah dengan melihat presentase kelulusan peserta didik, nilai rata-rata yang dicapai sekolah dan peringkat sekolah.⁷

Kendala tersebut juga dialami oleh SMP 3 Trienggadeng yang terletak di Jln. Peulandek-Gp. Matang, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya. Hasil observasi ditemukan bahwa SMPN 3 Trienggadeng memiliki akreditasi C yang artinya banyak kurang dan perlu dibenahi baik dari kurikulum pembelajaran, kerjasama, prestasi akademik dan non akademik, hal tersebut menjadi masalah bagi SMPN 3

⁶Ari Prayoga and Azhar Lujjatul Widad, "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah" 3, no. 1 (2019): 70–84.

⁷Edi Sujoko, "Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Berdasarkan Analisis Swot Di Sekolah Menengah Pertama," *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 83, <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p83-96>.

Trienggadeng yang kalah saing dengan sekolah lainnya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pihak sekolah harus melakukan analisis masalah dan merancang pemecahan masalah. Ditemukan kekurangan pada Standar Pengelolaan Pendidikan pada komponen melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan yakni aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat siswa.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan mengembangkan dan berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu di SMP Negeri 3 Trienggadeng. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah, salah satunya adalah dengan pengembangan standar pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam mengelola sekolah yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu sekolah.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan dengan merancang langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat menggunakan model pengembangan 4D (*Define, Design, Development, Dessimination*) agar sekolah tidak bertahan dengan mutu rendah yaitu C yang akan berdampak pada penutupan sekolah serta sekolah mampu mengobati satu permasalahan standar pengelolaan pendidikan pada komponen pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan terhadap aspek DUDI dan pihak Bakat minat untuk meningkatkan mutu sekolah.

B. Rumusan Masalah

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi standar pengelolaan pendidikan di SMPN 3 Trienggadeng?
2. Mengembangkan langkah-langkah standar pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu di SMP 3 Trienggadeng?
3. Menguji validasi langkah-langkah standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di SMP 3 Trienggadeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi analisis standar pengelolaan pendidikan di SMPN 3 Trienggadeng.
2. Untuk membuat rancang bangun langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di SMPN 3 Trienggadeng.
3. Untuk menguji validitas rancang bangun langkah-langkah pengembangan standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu di SMPN 3 Trienggadeng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Mengembangkan wawasan ilmu dan mendukung teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, terutama masalah mutu yang ada di SMP 3 Trienggadeng.
- b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan variable lebih banyak.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap sistem penjaminan mutu pendidikan yang telah diterapkan di sekolah. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan penyusunan program dalam meningkatkan mutu sekolah melalui standar pengelolaan pendidikan di SMPN 3 Trienggadeng.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana disebutkan standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.⁸

Implementasi standar pengelolaan pendidikan oleh sekolah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, sehingga seluruh sekolah, sehingga seluruh sekolah harus menerapkannya secara baik.⁹

2. Mutu

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.¹⁰

Mutu pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 2 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹¹ Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan

⁸Robert T Sataloff, Michael M Johns, and Karen M Kost, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan," *BNSP, Paduan Satuan Nasional Pendidikan*, 2007, 1–50.

⁹Dessyca Putri Zulfiana, Universitas Karimun, and Tanjung Balai Karimun, "Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis," *Jurnal Pendidikan MINDA* 1, no. 2 (2020): 61–73, <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/mindafkip/article/view/124>.

¹⁰B. Purnama, "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah," *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY* 12, no. 2 (2016): 113839.

¹¹Prayoga and Widad, "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah."

masyarakat, untuk mewujudkan harapan masyarakat, sekolah dan guru harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa.¹²



¹²Amrullah Aziz, "Peningkatan Mutu Pendidikan," *Jurnal Studi Islam Peningkatan Mutu* 10, no. 2 (2015): 1–14.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Standar Pengelolaan Pendidikan

1. Standar Pengelolaan berdasarkan UUD

Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.¹³

2. Kerangka Standar pengelolaan Pendidikan (Permendiknas No 19 Tahun 2007)

Adapun pemaparan analisis terkait dengan Permendiknas No 19 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Program

Perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan meliputi pembuatan visi, misi, tujuan dan rencana kerja.

¹³Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, "Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia* 3, no. September (2007): 1–22.

1. Visi Sekolah/Madrasah

Visi merupakan cita-cita lembaga yang dapat direalisasikan dalam kurun waktu tertentu, dan tentunya cita-cita tersebut merupakan keinginan yang realitas dan rasional, serta memungkinkan lembaga tersebut untuk mencapainya. Bagi sekolah visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa akan datang. Imajinasi kedepan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang akan datang yang diyakini akan terjadi di masa datang.

Visi sekolah menurut Perdiknas No 19 Tahun 2007 harus memenuhi kriteia berikut:

- a) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.
- b) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- c) Dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional.
- d) Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah.

- e) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- f) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

2. Misi Sekolah/Madrasah

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Misi sekolah menurut Permendiknas NO. 19 tahun 2007 harus memenuhi kriteria:

- a) Memberikan arahan dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- b) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- c) Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah.
- d) Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah.
- e) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah.

- f) Memberikan kuluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah.
- g) Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
- h) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
- i) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah/Madrasah

Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi sekolah. Perumusan tujuan akan strategi/perlakuan, arah kebijakan dan program suatu sekolah. Oleh karena itu perumusan tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel.

Perumusan tujuan menurut Perdiknas No.19 tahun 2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Menggambarkan tingkat kualitas yang perludicapai dalam jangkamenengah (empat tahun)
- b) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relavan dengan kebutuhan masyarakat
- c) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah.

- d) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah.
- e) Disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.¹⁴

4. Program Sekolah/Madrasah

Program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksudkan adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintahan atau lebih ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program kerja sekolah berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program kerja sekolah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

¹⁴BAPPEDA ACEH, "Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh 2015."

a) Sekolah/madrasah membuat :

- 1) Rancan kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.
- 2) Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

b) Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:

- 1) Disetujui rapat dewan pendidiksetalah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swata rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah.
- 2) Dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait :

c) Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah.

d) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,pertisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

e) Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai :

- 1) Kesiswaan
- 2) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran
- 3) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya
- 4) Sarana dan prasarana
- 5) Keuangan dan pembiayaan
- 6) Budaya dan lingkungan sekolah
- 7) Peranserta masyarakat dan kemtraan
- 8) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembagan mutu.¹⁵

b. Pelaksanaan Rencana Kerja

Pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasional sekolah, meliputi; pedoman sekolah/madrasah, struktus sekolah/madrasah, organisasi sekolah/madrasah, pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah, bidang kesiwaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan sekolah. Seluruh bidang tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh satuan pendidikan yang dibentuk dalam struktur organisasi sekolah/madrasah. Struktur organisasi sekolah terdiri dari semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

¹⁵Sataloff, Johns, and Kost, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan."

Pelaksanaan rencana kerja/kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggungjawab kegiatan.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.

Sekolah harus objektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan meliputi pemantuan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantuan dilakukan oleh komite sekolah, sedangkan supervisi dilakukan secara teratur oleh kepala sekolah. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya dalam waktu yang sudah ditetapkan bersama kepada kepala sekolah.

Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan harus menindak lanjuti setiap laporan yang diterimanya dan menggunakan hasil pemantauan atau pengawasan tersebut untuk memperbaiki kinerja sekolah dan sarana pendidikan.

1. Program evaluasi :

Jenis-jenis Evaluasi

- a) Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan pihak sekolah untuk menilai kinerja sekolah itu sendiri. Pihak sekola

menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi diri atau evaluasi sekolah dilakukan secara periodik berdasarkan pada data dan informasi yang sah.

- b) Evaluasi dan pengembangan kurikulum adalah proses yang dilakukan secara komprehensif dan fleksibel agar bisa menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir dan bersifat menyeluruh yang artinya melibatkan semua pihak.
- c) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga pendidik meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan peserta didik.

2. Akreditasi sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah/ madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensi

3. dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.¹⁶

d. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah

Secara umum kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. “kepemimpinan berarti kemauan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang untuk atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan”.

1. Fungsi Pemimpin

Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok utama belajar memutuskan dan bekerja, antara lain:

- a) Pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan.
- b) Pemimpin membantu kelompok untuk menorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberikan ransangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.
- c) Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.

¹⁶Muhammad Faisal Haq, “Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah,” *Evaluasi* 1, no. 1 (2017): 26–41.

d) Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif.

2. Tugas dan Kewajiban Pemimpin Sekolah/Madrasah :

- a) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu yang akan dicapai
- b) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai
- c) Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah dan madrasah.
- d) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu.
- e) Bertanggungjawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah dan madrasah.
- f) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal ini sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah dan madrasah.
- g) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat.
- h) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidikan dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian

penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.

- i) Bertanggungjawab atas perencanaan pertisifatif mengenai pelaksanaan kurikulum.

e. Sistem Informasi Manajemen

Dalam hal pengelolaan sistem informasi ini, semua warga sekolah/madrasah mempunyai tanggungjawab yang sama dengan melalui intruksi dari kepala sekolah/madrasah. Berdasarkan hal yang terkait dengan sistem informasi ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Pengelolaan sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 2) Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah untuk diakses.
- 3) Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkan dan didokumentasikan.
- 4) Melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .

- 5) Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.¹⁷

B. Mutu Sekolah

1. Pengertian Mutu

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang mutu, diantaranya Croby yang menyatakan bahwa mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan atau yang distandarkan. Sedangkan menurut Suryosubroto, mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* atau *intangible*. Mutu yang *tangible* artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Sedangkan mutu yang *intangible* adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya.¹⁸

Sementara itu, *The International Standar Organization*(ISO) menguraikan bahwa mutu atau kualitas itu adalah totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan tersirat, artinya jika produk atau layanan itu memberikan kepuasan pada konsumen maka produk atau layanan itu dikatakan bermutu.¹⁹

¹⁷Anngun Goen, "Standar Pengelolaan Pendidikan," *Evaluasi* 1, no. 2 (n.d.).

¹⁸Ismail, "Implementasi Penjaminan Mutu Di Lembaga Pendidikan Islam ; Dan MAN 1 Kota Bitung."

¹⁹Gaspers Vincent, *Total Quality Control* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Mutu pendidikan berdasarkan Undang-undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²⁰

Standar mutu merupakan paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a) Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan; 1) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, 2) sesuai dengan penggunaan dan tujuan, 3) produk tanpa cacat, dan 4) sekali benar dan seterusnya.
- b) Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan; 1) kepuasan pelanggan, jika produk dan jasa melebihi harapan pelanggan, 2) setia kepada pelanggan.²¹

Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah standar pengelolaan yaitu standar nasional pendidikan yang

²⁰Prayoga and Widad, "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah."

²¹PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN, "Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan," *Salinan*, 2015.

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggara pendidikan.²²

2. Komponen Mutu Pendidikan

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kedua, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Ketiga, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajaran. Keempat, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi) dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah.²³

Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem kelola yang baik dan disampaikan oleh guru yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu.

- a) Materi pelajaran adalah materi pelajaran yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, baik dirasakan langsung maupun dirasakan kemudian. Materi pelajaran harus memberi wawasan yang bersifat dan meningkat secara terus dan menerus. Materi pelajaran itu juga harus memberi pengalaman yang berharga bagi peserta didik. Kemudian, materi yang dapat menumbuhkan semangat, motivasi, dan kreativitas berpikir bagi peserta didik. Dan materi pelajaran itu harus mampu mengubah sikap, pemikiran, dan perilaku kearah pembentukan

²²Ridwan Abdullah, *Manajemen Mutu Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

²³Muhammad Nur, "Manajemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie" 4, no. 1 (2016): 5.

watak/kepribadian yang mendorong peserta didik tampil dengan jati dirinya yang lebih matang.

- b) Perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya dimaksudkan untuk mencetak dan mempersiapkan masa depan peserta didik agar mereka dapat hidup dengan baik dizamannya, tapi juga mempersiapkan dan membekali mereka ketika manusia menghadap Allah Swt.
- c) Tata kelola pendidikan yang baik adalah sistem tata kelola dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif, saling terkait, dan bersinambungan antar komponen yang satu dengan yang lainnya.
- d) Pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar.²⁴

3. Penjaminan Mutu

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan RI nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi 1. Proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

²⁴Dedi Mulyasa, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing* (Bandung: Remeja Rosdakarya, 2012).

didik, 2. Dalam proses pembelajaran pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan, 3. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengindikasikan tentang pentingnya memperhatikan mutu pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Sistem Penjaminan Mutu dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP), penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu.²⁵

Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan ditingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup ; penilaian mutu, analisis dan pelaporan, peningkatan mutu.²⁶

²⁵Haryono et al., "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang," *Jurnal Panjar* 1, no. 1 (2019): 17–22.

²⁶Aziz, "Peningkatan Mutu Pendidikan."

C. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sependapat dengan Harson Anwar yang menyatakan garapan standar pengelolaan pendidikan yang dikelola melalui perencanaan, pelaksanaan, organisasi dan evaluasi untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas yang bermutu.²⁷ Kemudian Enditiyas Pratiwi, menemukan pelaksanaan pengelolaan sekolah daerah pesisir aspek pemenuhan kualitas layanan peserta didik, kepemimpinan, serta sistem informasi manajemen masih belum optimal dan belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan.²⁸

Mera Putri Dewi dkk, menemukan kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.²⁹ Dan Fatma Khaulani dkk, menemukan kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar untuk melihat ketercapaian standar isi.³⁰ Hal ini sependapat dengan Ika Farma dkk, menemukan kebijakan dan pengelolaan dasar untuk ketercapaian hasil belajar peserta didik

²⁷Herson Anwar, "Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 15–27.

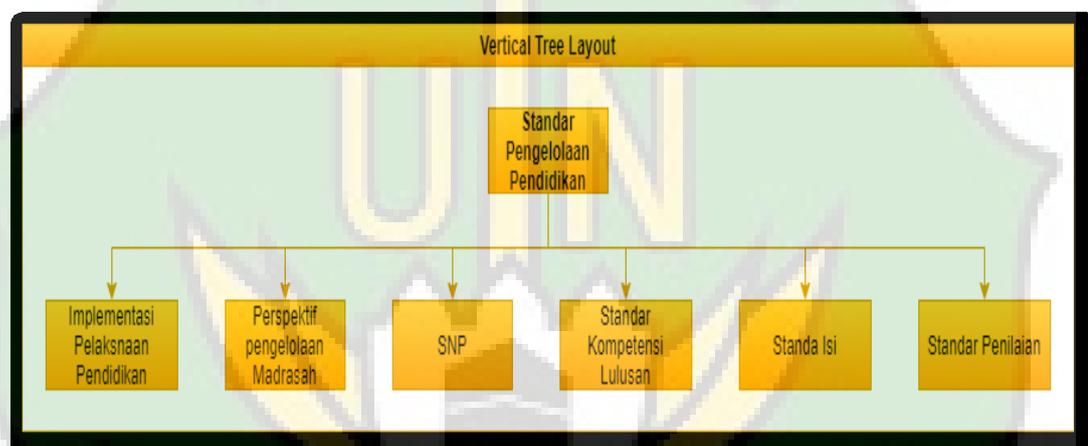
²⁸Enditiyas Pratiwi and Muhsinah Annisa, "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan" 1 (2017): 210–16.

²⁹Mera Putri Dewi, Sufyarma Marsyidin, and Ahmad Sabandi, "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Kompetensi Lulusan Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 144–52, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>.

³⁰Fatma Khaulani, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Sabandi, "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Isi Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 121–27, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>.

yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian peserta didik pada pendidikan dasar.³¹

Temuan peneliti sebelumnya sepakat bahwa harapan standar pengelolaan pendidikan yang dikelola melalui perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan evaluasi untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Peneliti lainnya menemukan pengelolaan pendidikan dilakukan untuk ketercapaian standar lulusan, standar isi, dan standar penilaian pada satuan pendidikan.



Gambar 1.1 Peta Standar Pengelolaan Pendidikan yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Mutu pendidikan adalah keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. Proses peningkatan mutu dilakukan dengan cara menerapkan 8 SNP secara efektif dan efisien dalam mengelola satuan pendidikan, salah satunya yaitu mengimplementasikan standar pengelolaan

³¹Ika Firma Ningsih Dian Primasari, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri, "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 3, no. 2 (2020): 524–32.

pendidikan (perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan, serta SIM) dalam peningkatan mutu.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fitriani Rosdiana yang menyatakan bahwa penjaminan mutu menggunakan 4 tahapan penetapan standar, diantaranya: pemenuhan standar, evaluasi secara terus menerus, peningkatan mutu serta penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan.³² Kemudian temuan Feiby Ismail yang menunjukkan bahwa implementasi penjaminan mutu di madrasah mengacu pada standar nasional pendidikan, terlihat pada meningkatnya prestasi siswa dibidang akademik, seni, dan olahraga sehingga memberikan penegasan bahwa madrasah memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing dengan sekolah lain.³³

Serta temuan Ari Prayoga menunjukkan bahwa madrasah Aliyah An-Najiyah Bandung dalam penjaminan mutu dari segi delapan standar delapan standar nasional pendidikan sudah berada pada tingkat yang baik bahkan melebihi standar pelayanan minimal sehingga menjadi keunggulan tersendiri bagi madrasah ini.³⁴ Dan Haryona dalam mengkaji penjaminan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan dari BSNP.³⁵

Peningkatan mutu sekolah dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari 8 Standar Pengelolaan Pendidikan diantaranya standar isi, standar proses, standar

³²Fitriyani Rosdiana and Uung Runalan Soedarmo, "Sistem Penjaminan Mutu Dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model Dan Sekolah Imbas," *Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 1–6.

³³Ismail, "Implementasi Penjaminan Mutu Di Lembaga Pendidikan Islam ; Dan MAN 1 Kota Bitung."

³⁴Prayoga and Widad, "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah."

³⁵Haryono et al., "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang."

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Upaya peningkatan mutu sekolah tidak hanya dilakukan dengan menerapkan 8 standar nasional pendidikan, namun upaya peningkatan mutu juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia, manajemen masyarakat, manajemen pembiayaan, kepemimpinan sekolah, otonomi pendidikan, serta implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

Basuki Jaka Pernamamenemukan bahwa dalam upaya peningkatan mutu sekolah, kepala sekolah harus mampu mengatur keseluruhan sekolah termasuk mengatur sumber daya manusia yang ada; terutama guru dan staff administrasi yang merupakan pelaksanaan langsung dalam kegiatan sekolah yang berperan besar dalam kesuksesan sekolah dalam rangka untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam hal manajemen sumber daya manusia, kepala sekolah memiliki tugas yang terbagi dalam tiga aspek diantaranya: 1) pembekalan bagi para pegawai, 2) pemanfaatan para pegawai yang sudah ada, 3) membangun dan mengembangkan.³⁶

Soenedi dkk, juga menemukan hal yang sama mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai leader, sebagai manajer dan sebagai motivator dalam meningkatkan mutu sekolah. Sebagai seorang leader kepala sekolah mampu menumbuhkan rasa percaya diri warga sekolah, kepala sekolah juga berhasil menekankan tentang nilai-nilai penting sekolah yang harus diperjuangkan, kepala sekolah selalu mengatakan *do your best dan keep doing it*

³⁶Purnama, "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah."

even when no body see it, kepala sekolah juga mampu menekankan tujuan bersama dan menjadi panutan dan kebanggan bagi guru, karyawan dan siswa, kepala sekolah juga mampu menginspirasi semua warga sekolah, sebagai seorang pemimpin juga mempunyai kompetensi tinggi untuk mengajar dan melatih warga sekolah. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah mampu mengelola sekolah dengan baik, misalnya menyusun RPBS, mampu mengembangkan sekolah sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat, mampu memberdayakan sumber daya sekolah serta mampu mengembangkan sekolah menuju pembelajaran yang efektif. Sebagai seorang motivator, kepala sekolah selalu mencetuskan ide baru, menjalankan program berbasis sekolah, melakukan inovasi pembelajaran, mengembangkan profesionalisme dan tenaga kependidikan, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menantang, edukatif, dan kreatif.³⁷

Edi Sujoka, menyatakan bahwa berdasarkan analisis SWOT dari aspek input, proses, dan output untuk meningkatkan mutu sekolah SMP 1 Bawen yang berada pada kuadran I (SO), untuk mendukung pertumbuhan mutu sekolah maka perlu dibuat rencana strategis yang menggunakan kekuatan dari lingkungan internal sekolah untuk dapat menangkap peluang dari lingkungan eksternal sekolah.³⁸ Hiyasintus Ile Wulogening, juga menyatakan hal yang sama mengenai sistem manajemen perencanaan program sekolah untuk mendukung budaya mutu di lingkungan sekolah, yang meliputi: perumusan visi, misi, serta tujuan sekolah.

³⁷Sonedi Sonedi, Tutut Sholihah, and Dihasbi Dihasbi, "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru," *Anterior Jurnal* 18, no. 1 (2018): 13–22, <https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.436>.

³⁸Sujoko, "Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Berdasarkan Analisis Swot Di Sekolah Menengah Pertama."

Begitu pula dengan menyusun berbagai Rencana Kerja Sekolah (RKS) dengan aneka program yang dihasilkan.³⁹

Kemudian Ade Cahyana, menemukan bahwa dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen alternatif ini memberikan kemandirian pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu pada kebijakan nasional.⁴⁰ Isep Djuanda, juga menemukan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Al-Muslim Bekasi, yang meliputi otonomi sekolah, proses belajar mengajar dan partisipasi orang tua siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan SMA Al-Muslim Bekasi.⁴¹

Rachmat Satria dkk, menyatakan bahwa manajemen hubungan masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah secara internal maupun eksternal meliputi dimensi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pihak sekolah dalam merancang program-program sekolah.⁴² Kemudian N. Eva Lucia, menemukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah Kota Taksimalaya untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kepuasan siswa dan melakukan layanan prima. Ditinjau dari aspek prestasi sekolah, SMK Muhammadiyah Kota Taksimalaya setelah melaksanakan manajemen mutu ISO

³⁹Hiyasintus Ile Wulogening and Agus Timan, "Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Sistem Manajemen Perencanaan Kepala Sekolah," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 137–46, <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31282>.

Cahyana, "Upaya Peningkatan Mutu Melalui Otonomi Satuan Pendidikan."

⁴¹Djuanda, "Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah."

⁴²Rachmat Satria et al., "Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Hubungan Masyarakat," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. September (2019): 199–207.

9001;2008 mengalami peningkatan terutama dalam hal prestasi akademik dan non akademik. Jika dilihat dari sisi produk, kualitas peserta didik SMK Muhammadiyah Taksimalaya sudah lebih baik dari sebelumnya. Kepuasan peserta didik pun sudah lebih baik atau meningkat.⁴³

Amrullah Aziz, menemukan bahwa upaya peningkatan untuk mencapai pendidikan bermutu tidak hanya melakukan pemenuhan pada aspek input dan output saja, namun yang lebih penting adalah aspek proses. Rendahnya mutu pendidikan meliputi seluruh sistem kependidikannya, terutama sistem manajemen dan etos kerja, kualitas guru, kurikulum dan sarana fisik dan fasilitasnya. Dan yang lebih ironis lagi selalu rebutan jabatan, tidak maudipimpin, sifatnya selalu ingin memimpin, selalu ingin menang sendiri, walau kenyataan benar-benar salah tak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.⁴⁴ Rendahnya mutu pendidikan juga ditemukan oleh Bambang Ismaya, temuan penelitiannya yaitu peran pemimpin sekolah sebagai pemrakarsa inovatif, kreatif, dan berkarakter perubahan/kemajuan pendidikan, minat profesional guru, dukungan orang tua, motivasi siswa masih rendah.⁴⁵ Dan Sri winarsih, menyatakan bahwa keberhasilan manajemen mutu dalam dunia pendidikan (sekolah) dapat diukur tingkat kepuasan pelanggan.

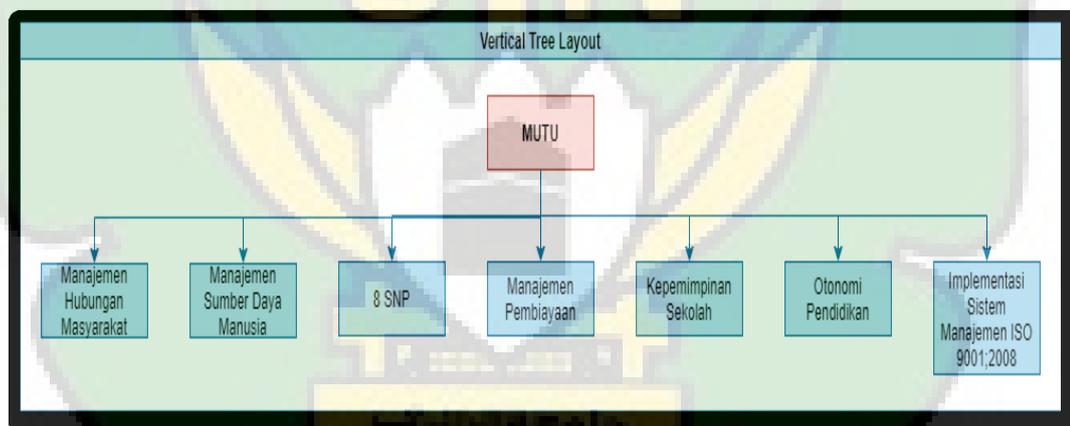
⁴³N. Eva Lucia, "Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dalam Meningkatkan Prestasi Sekolah," *Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan* 5, no. 1 (2017): 37–44.

⁴⁴Aziz, "Peningkatan Mutu Pendidikan."

⁴⁵Bambang Ismaya, "Model Kepemimpinan Sekolah Berkarakter Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Bambang," *Jurnal Pendidikan Unsika* 3 Nomor 1, no. Maret 2015 (2015): 97–108.

Sekolah dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan “pelanggan Pendidikan”.⁴⁶

Temuan peneliti sebelumnya sepakat bahwa upaya peningkatan mutu terlaksana dengan baik, jika penerapan delapan standar pengelolaan pendidikan diterapkan dengan baik di sebuah lembaga pendidikan. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa upaya peningkatan mutu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia, manajemen hubungan masyarakat, manajemen pembiayaan, kepemimpinan sekolah, otonomi pendidikan, serta implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001; 2008.



Gambar 1.2 Peta Mutu yang telah ditemukan oleh ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

⁴⁶Sri Wunarsih, “Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah,” *International Conference Of Mouslem Society 1* (2016): 44–59.



Gambar 1.3 Peta Konsep Peneliti

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan ditingkat SMP/MTS yaitu pada SMPN 3 Trienggadeng. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 09 April 2021 dimulai dari observasi awal sampai tahapan dalam penelitian ini selesai dan mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti.

B. Karakteristik Sasaran Penelitian

Karakteristik sasaran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah SMP 3 Trienggadeng. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan ini untuk meningkatkan mutu atau akreditasi sekolah di SMP 3 Trienggadeng.

C. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode penelitian dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Metode kualitatif merupakan hasil data yang berupa deskripsi dalam bentuk kalimat. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁷

Data kualitatif ini berupa bentuk kritik dan saran validator terhadap produk yang dikembangkan dan deskripsi keterlaksanaan respon.

⁴⁷Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remeja Rosdakarya, 1996).

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta penampilan dari hasilnya.⁴⁸

D. Model Pengembangan

Riset pengembangan merupakan suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang yang melewati berbagai tahapan. Tujuan dari riset pengembangan ; (1) perumusan konsep baru pendidikan, (2) memperbaiki konsep pendidikan yang telah ada, (3) menguji atau menverifikasi aplikasi dari berbagai konsep pendidikan dalam praktik di lapangan, (4) merumuskan sejarah pendidikan, (5) menguji keefektifan suatu konsep atau perangkat pendidikan, (6) menemukan berbagai kelemahan dari berbagai teori, konsep ataupun praktik kependidikan, serta mencari berbagai cara memeperbaikinya.⁴⁹

Dalam pengembangan implementasi standar pengelolaan pendidikan perlu diperhatikan model-model pengembangan guna memastikan kualitasnya, penggunaan model pengembangan dalam mengimplementasi standar pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan teori akan menjamin kualitas dan mutu sekolah. Model tersebut yaitu model 4D yang merupakan singkatan dari definisi (*define*), desain (*design*), pengembangan (*development*), penyebaran (*dissemination*).

⁴⁸Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineq Cipta, 2006).

⁴⁹Muhammad Ali, *Metodelogi Dan Dan Aplikasi Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 20014).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sampai pada tahap development (pengembangan) disebabkan karena keterbatasan waktu dan sedang dilakukan pembatasan social guna mencegah penyebaran Covid-19.

Peneliti menggunakan angket untuk mengukur kelayakan dan kemenarikan dari media berdasarkan aspek dan juga teknisnya. Angket yang digunakan peneliti menggunakan skala 1 sampai dengan 4 dari skala likert dengan kriteria: 1 = Tidak Setuju, 2 = Kurang Setuju, 3 = Cukup Setuju, 4 = Sangat Setuju.

Menghitung presentase dari tiap-tiap subvariabel menggunakan rumus ;

$$P = \frac{\sum x \sum xi}{\sum x \sum xi} \cdot 100\%$$

Keterangan:

P = Jumlah presentasi pada alternatif jawabana

$\sum x$ = Jumlah alternatif jawaban

$\sum xi$ = Nilai maksimum alternative jawaban⁵⁰

E. **Prosedur Pengembangan**

Adapun prosedur pengembangan menggunakan model 4D yaitu:

1. **Define (Definisi)**

Tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang digunakan dalam proses meningkatkan mutu. Terdapat 5 langkah kegiatan yang dilakukan pada tahap pendefinisian, yaitu:

⁵⁰Dede Rohaniawati, "Penerapan Pendekatan Pakem untuk Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Guru," *Tadris : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 1, no. 1 (2016): 52.

a. Analisis awal akhir

Peneliti melakukan observasi dan analisis terhadap kondisi atau keadaan permasalahan mengenai implementasi standar pengelolaan pendidikan di lapangan yakni pada SMPN 3 Trienggadeng. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan mutu di SMPN 3 Trienggadeng.

b. Analisis mutu

Analisis mutu dilakukan dengan cara mengamati budaya dan lingkungan sekolah yakni dengan melihat implementasi standar pengelolaan pendidikan di sekolah.

c. Analisis konsep

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui konsep dasar atau pedoman dalam melakukan peningkatan mutu sekolah dengan cara melihat penerapan standar pengelolaan pendidikan yang diterapkan di sekolah.

d. Analisis tugas

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi hasil dari evaluasi yang dilakukan tenaga kependidikan untuk peningkatan mutu sekolah dalam mengimplementasi standar pengelolaan pendidikan.

e. Spesifikasi tujuan mutu

Tahap ini bertujuan untuk mengkonversi tujuan dari analisis implementasi standar pengelolaan pendidikan dan analisis konsep yang telah dilakukan untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan peningkatan mutu sekolah.

2. Design (desain)

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan dan merancang langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan untuk peningkatan mutu sekolah.

3. Development (pengembangan)

Langkah-langkah dalam tahap ini yaitu:

a. Validasi

Produk awal yang telah dibuat selanjutnya divalidasikan pada tim validator. Validasi bertujuan untuk mendapatkan masukan, dan saran perbaikan serta penilaian kelayakan produk sebelum dilakukan ujicoba kepada pada peserta didik. Validator penilaian ini adalah:

- 1) Tiga orang dosen yaitu dosen ahli yang mengerti tentang mutu sekolah.
- 2) Tiga orang tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data pada stimulasi ini dilakukan dengan memberikan angket kemenarikan kepada tenaga kependidikan untuk mengetahui respon terhadap media yang dikembangkan.

4. Dissemination (penyebaran)

Proses dideminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Tahap diseminasi dilakukan untuk menyerbaluaskan peningkatan mutu sekolah.

Namun pada penelitian ini tidak dilakukan tahap disseminate karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengembangan ini, data diambil dari hasil analisis kebutuhan, wawancara, data validasi, angket respon tenaga kependidikan dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data awal dalam penelitian dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan kegiatan peningkatan mutu sekolah. Hal ini dilakukan secara langsung (tatap muka).

2. Data Validasi

Data validasi diperoleh dari validator guna untuk mengkonfirmasi kevalidan kegiatan peningkatan mutu sekolah.

3. Angket Respon Tenaga Kependidikan

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang berisikan seperangkat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan proses dalam peningkatan mutu yang harus diisi oleh kepala sekolah, waka sekolah dan guru. Hasil dari angket ini bertujuan untuk melihat respon tenaga kependidikan terhadap kegiatan peningkatan mutu sekolah.

4. Dokumentasi

Dengan pengambilan foto sebagai bukti dalam proses mengidentifikasi kegiatan peningkatan mutu dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan.

5. Instrumen penelitian

Instrumen pengumpulan data pada tahapan eksplorasi berupa pendoman observasi, wawancara dan dokumentasi yang dikembangkan berupa pertanyaan terbuka (*open-ended*) nawal yang bisa berkembang ketika peneliti berada dilapangan. Sedangkan instrumen pada tahapan pengembangan dengan menggunakan prosedur pengembangan skala *Likert* (untuk angket) dan menggunakan prosedur pengembangan perangkat tes terstandar untuk menguji keefektifan pencapaian hasil belajar.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk menghasilkan kegiatan kerjasama dalam melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan. Untuk memenuhi kriteria tersebut dilakukan analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis secara dekriptif kualitatif. Saran dari masukan dosen ahli dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat sebagai validator, digunakan sebagai bahan perbaikan dalam tahap revisi perkembangan mutu.

7. Analisis Data Validasi Kuantitatif dan Kualitatif

Analisis data validasi dilakukan dengan mencari rata-rata.

a. Skor rata-rata

- Mentabulasi data dari validator

Hasil data validasi merupakan pedoman interpretasi daya yang digunakan dalam skala *likert*.

Hasil validasi ahli :

Tingkat Pencapaian (%)	Kualifikasi
$75 < P \leq 100$	Sangat Layak
$60 < P \leq 100$	Layak
$35 < P \leq 100$	Kurang Layak
$20 < P \leq 100$	Tidak Layak

Table 3.1. Validasi Ahli

Apabila hasil validasi menunjukkan tingkat pencapaian $\geq 61\%$, langkah-langkah kerjasama yang dikembangkan dapat dinyatakan valid, maka peneliti tidak harus merevisi langkah tersebut. Jika masih perlu revisi, itu hanya pada bagian yang dianggap perlu saja. Jika hasil dari validasi menunjukkan tingkat pencapaian dengan nilai rata-rata 61% produk dinyatakan belum valid dan peneliti perlu melakukan revisi terhadap langkah-langkah kerjasama yang akan dikembangkan.

- Analisis kepraktiran kuantitatif dan kualitatif

Indikator yang digunakan dalam mendukung kepraktisan menurut Nieveen dan akker adalah (1) apakah para ahli dan praktisi mengatakan bahwa mutu sekolah dapat meningkat dan (2) secara

nyata dilapangan, mutu sekolah dapat diterapkan serta meningkatkan mutu sekolah dengan cara mengimplementasi standar pengelolaan pendidikan termasuk kategori baik. Hal ini dapat dilihat :

a. Angket repon tenaga kependidikan

Data angket respon tenaga kependidikan terhadap peningkatan mutu sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tabulasi data yang diperoleh dari tenaga kependidikan SMPN 3 Trienggadeng. Penskoran angket respon tenaga kependidikan memberikan tanda centang (✓) pada pilihan respon tenaga kependidikan yaitu: SS = Sangat Sesuai (Skor 4), S = Sesuai (Skor 3), CK = Cukup Sesuai (Skor 2), KS = Kurang Sesuai (Skor 1). Dengan rumus:

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan :

- X = skor rata-rata setiap aspek
 $\sum x$ = jumlah skor setiap aspek
 N = jumlah responden

- 2) Mengkonversi rata-rata skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif sesuai kriteria dengan skor minimum ideal adalah 1 dan maksimum ideal adalah 4, menjadi tabel berikut:

Interval	Kriteria
$4 X > 3,25$	Sangat Baik
$3 < X \leq 3,25$	Baik
$2 X > 3,25$	Cukup Baik

$1 < X \leq 3,25$	Kurang Baik
-------------------	-------------

Table 3.2. Kepraktisan Berdasarkan Respon Tenaga Kependidikan

Tabel Kriteria Praktisan Berdasarkan Respo Tenaga Kependidikan Interval $4 \times > 3,25$ kriteria Sangat Baik, interval $3 < \times \leq 3,25$ Kriteria Baik, interval $2 \times > 3,25$ Kriteria Kurang Baik. Keterangan : X = rata-rata skor dari tenaga kependidikan.⁵¹

Berdasarkan definisi diatas produk yang dikembangkan dikatakan baik jika respon tenaga kependidikan berada pada kriteria baik, jika kurang dari kriteria yang sudah ditetapkan maka perlu direvisi.

⁵¹Azwar, S “ *Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010).h. 98,

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sekolah

SMPN 3 Trienggadeng merupakan sekolah menengah pertama yang berstatus Negeri dan berdiri sejak tahun 1994 yang beralamatkan di Jln. Peulandok, Matang, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya. SMPN 3 Trienggadeng berakreditasi C.

Hasil Pengamatan Keadaan Lingkungan Sekolah

Nama Sekolah : SMPN 3 Trienggadeng

NPSN : 10100530

Bentuk Pendidikan : SMP

Status Kepemilikan : Negeri

Kepala Sekolah : Musri S. Pd

Guru : 25

Siswa Laki-laki : 23

Siswa Perempuan : 25

Rombongan Belajar : 3

Kurikulum : SMP 2013

Ruang Kelas : 13

Laboratorium : 2

Perpustakaan : 1

B. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Trienggadeng untuk melihat ramcang bangun langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 4D (Definisi, Design, Development, Dissemination). Data yang dihasilkan dari setiap tahap prosedur dan pengembangan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Define (Definisi)

Tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang digunakan dalam proses peningkatan mutu. Terdapat 5 langkah kegiatan yang dilakukan pada tahap pendefinisian, yaitu:

a. Analisis awal akhir

Peneliti melakukan observasi dan analisis terhadap kondisi atau keadaan permasalahan mutu di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai bentuk peningkatan mutu disekolah. Analisis awal ini dilakukan melalui pra-penelitian dengan cara wawancara terhadap tenaga kependidikan SMPN 3 Trienggadeng.

Hasil wawancara dengan 3 tenaga kependidikan diperoleh bahwa kendalanya, banyaknya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam lingkup sempit membuat persaingan semakin ketat. Hal ini menajadi masalah bagi SMPN 3 Trienggadeng yang kalah bersaing dalam beberapa hal, di mana mereka akan kesulitan untuk mendapatkan peserta didik baru yang diharapkan.

Analisis akhir ini dilakukan untuk melihat penilaian dan saran perbaikan dari tenaga kependidikan terhadap langkah-langkah peningkatan mutu disekolah.

b. Analisis mutu

Analisis mutu dilakukan dengan cara mengamati sejauh mana implementasi standar pengelolaan pendidikan yang diterapkan disekolah, serta mengamati budaya dan lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil analisis mutu dengan mengimplementasikan standar pengelolaan pendidikan belum semua standar pengelolaan pendidikan diterapkan disekolah. Sedangkan analisis awal tenaga kependidikan bahwa adanya pengembangan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu, yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan mutu disekolah.

c. Analisis konsep

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui konsep dasar atau pedoman dalam melakukan pengembangan implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah.

d. Analisis Tugas

Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara implementasi standar pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu yang diterapkan disekolah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan angket yang akan divalidasikan oleh para ahli dibidang mutu dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul mengenai implementasi

standar pengelolaan dalam peningkatan mutu sehingga diperoleh solusi yang tepat untuk dikembangkannya disekolah dalam meningkatkan mutu sekolah.

e. Spesifikasi tujuan mutu

Tahap ini bertujuan untuk mengkonversi tujuan dari analisis konsep yang telah dilakukan untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan implementasi standar pengelolaan pendidikan. Spasifik mutu ini ditentukan setelah mengabungkan dari analisis-analisis yang dilakukan sebelumnya. Hal yang akan dilakukan peneliti terhadap spesifikasi implementasi standar pengelolaan pendidikan yaitu dengan 2 tahap, meliputi : wawancara dan angket.

2. Design (sesain)

Tahap ini dilakukan untuk menyiapkan langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan untuk meningkat mutu sekolah, sehingga standar pengelolaan pendidikan dapat diterapkan dengan baik di sekolah dalam mendukung meningkatnya mutu di sekolah.

3. Development (Pengembangan)

Langkah-langkah dalam tahap ini yaitu :

a. Validasi

Produk awal yang telah dibuat selanjutnya divalidasikan pada tim validator, yaitu ahli materi dan ahli media. Validasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, dan saran perbaikan serta penilaian kelayakan produk sebelum diimplementasikan. Validator penelitian ini adalah:

- a) 3 orang dosen ahli yang paham tentang standar pengelolaan pendidikan.
- b) Tiga orang tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat pendidik dan telah menjadi pendidik minimal 5 tahun.

Validasi yang dilakukan pada ahli materi ini mencakup beberapa aspek yang terkait kesesuaian implementasi standar pengelolaan pendidikan, keakuratan materi, kemutakhiran materi, dan mendorong keingintahuan dengan melakukan pengisian angket penilaian pada skala 1 sampai 4 serta melihat keterkaitan antara implementasi standar pengelolaan pendidikan dengan peningkatan mutu. Selain melakukan penilaian dengan angket yang telah disediakan, validator juga dapat memberikan saran terhadap kualitas implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu disekolah.

1. Hasil Validasi

Aspek	Kriteria	V1	V2	V3
Kualitas Isi	Kegiatan Kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan	3	4	4
	Kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan	3	4	4

Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU	3	4	3
Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan	4	4	4
Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan	3	4	4
Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholder</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah	4	4	4
Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan	3	4	4
Tahapan Pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan	4	4	4

Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refreasing yang mendidik	3	4	4
Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk aspek dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan	4	4	4
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan	3	4	4
Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	3	4	4
Evaluasi dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan	3	4	4
Jumlah	1.219		
Presentase	93,7%		

Table 4.1. Hasil Validasi

Pada tabel diatas implementasi standar pengelolaan pendidikan pada komponen melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraaan dengan lembaga lain yang relavan yakni dengan melakukan kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minatdalam peningkatan mutu sekolah diperoleh presentase sebesar 93,7% dengan kriteria sangat setuju atau dinyatakan sangat layak. Pada tahap ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi standar pengelolaan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan dengan melakukan kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat untuk meningkatkan mutu sekolah yang sudah divalidasi oleh ahli mutu dinyatakan sangat layak dan dapat digunakan.

b. Hasil revisi validasi

Berdasarkan tabel diatas terdapat saran dan masukan dari validator mengenai langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat dalam melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan.

Validator	Bagian dari dikritisi	Saran dan Masukan	Perbaikan
V1	Dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan	Perbaiki kosa kata yang bagus di langkah-langkah kerjasama	Menambahkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama

V2	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan siswa harus jelas	Pemberian bahasa yang tepat	Kesesuaian Langkah-langkah kegiatan kerjasama
V3	Dalam aspek langkah-langkah kerjasama sebaiknya dilakukan pembentukan <i>organizing</i>	Penempatan peraturan dan pelaksanaan	Menambahkan aspek <i>organizing</i> dalam langkah-langkah kerjasama

Table 4.2 Saran Validator

Berdasarkan tabel diatas terdapat saran dan masukan dari validator mengenai langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat.

c. Hasil Respon Tenaga Kependidikan

Langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan yang dilakukan sekolah guna untuk meningkatkan mutu sekolah. Pengumpulan data pada respon ini dilakukan dengan memberikan angket kemenarikan kepada tenaga kependidikan untuk mengetahui respon terhadap langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat dalam melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan.

1. Hasil Respon Terhadap Tenaga Pendidik

Hasil respon kemenarikan dari angket tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholdor</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah	4	3	4	11	3,6	SB
Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan	3	4	4	11	3.6	SB
Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan	3	4	3	10	3.3	SB
Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refresing yang mendidik	3	4	4	11	3.6	SB

Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan	4	4	4	12	4	SB
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan	3	3	4	10	3.3	SB
Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	3	3	4	10	3.3	SB
Evaluasi dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan	4	4	4	12	4	SB

Table 4.3. Hasil Respon Terhadap Tenaga Kependidikan

Berdasarkan tabel uji coba, dengan skor dari 4 yang berartikan $X > 3,25$ maka implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak lain yang relevan pada aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak bakat minat dalam meningkatkan mutu memiliki kriteria “Sangat Baik” sehingga dapat diterapkan dan efektif untuk jalannya implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam pelibtan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak lain yang relevan. Dengan jumlah responden sebanyak tiga orang tenaga kependidikan yakni, Musri, S.Pd, Deni Abdillah, S,Pdi, dan Nurlina, S,Pdi.

4. Dissemination (penyebaran)

Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan langkah-langkah pengelolaan kelas agar meningkatnya disiplin peserta didik dalam belajar secara daring.

Tahap diseminasi untuk menyebarluaskan produk implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu telah dikembangkan. Setelah langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan melalui tahap validasi, dan revisi, serta telah siap tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menyebarluaskan langkah ini melalui blog. Blog ini nantinya akan berisikan *software power point* yang dapat di *download*. Namun pada penelitian ini tidak dilakukan tahap disseminate karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

C. Pembahasan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan model 4D (*Define, Design, Development, dan Dissemination*) untuk mengembangkan langkah-langkah standar pengelolaan pendidikan guna mendapatkan kelayakan dan kemenarikan serta keefektifan dari implementasi standar pengelolaan pendidikan tersebut. Penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Trienggadeng yang sebelumnya peneliti juga melakukan pra-penelitian di sekolah tersebut. Hasil dari observasi di sekolah dengan melakukan wawancara pada kepala sekolah yaitu bapak Musri S.pd diperoleh bahwa kendalanya, sekolah yang kalah bersaing dengan sekolah lain baik itu secara akademik maupun non akademik dikarenakan banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam lingkup yang sempit sehingga pihak sekolah kesulitan dalam mendapatkan peserta didik baru yang diharapkan dan menyebabkan mutu sekolah menurun. Butuh langkah-langkah khusus untuk meningkatkan mutu sekolah.

1. Mengidentifikasi masalah dalam implementasi standar pengelolaan pendidikan SMPN 3 Trienggaden

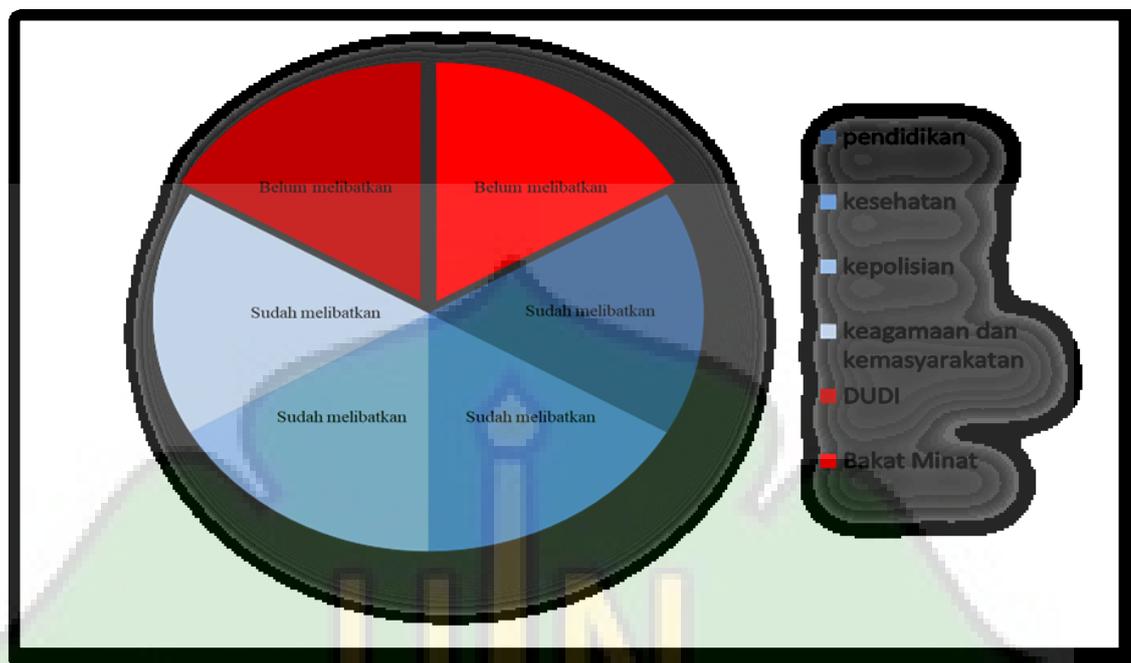
Hasil angket instrumen standar pengelolaan pendidikan yang diisi oleh Waka kurikulum terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan di SMPN 3 Trienggadeng :

NO	Istrumen Standar Pengelolaan Pendidikan	Kategori
1	pelaksanaan program	B
2	melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan	B
3	SIM	B

Table 4.4. Hasil Angket Intrumen Standar Pengelolaan Pendidikan

Namun pada penelitian ini tidak dilakukan langkah perbaikan untuk ke 3 instrumen standar pengelolaan pendidikan dengan kategori B yang diterapkan disekolah kerana keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti hanya fokus dengan satu intrumen standar pengelolaan pendidikan dengan kategori B yang diterapkan disekolah untuk ditindak lanjuti kelangkah perbaikan yaitu melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan lain yang relavan.

Dalam implementasi standar pengelolaan pendidikan, pihak sekolah belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan. Pihak sekolah hanya melakukan kerjasama dengan 4 kelembagaan antara lain ; 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) kepolisian, 4) keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian pada standar pengelolaan pendidikan dalam pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan diperlukan bekerjasama pihak DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) dan pihak Bakat Minat. Sebagaimana yang digambarkan dalam diagram berikut.



Gambar 4.1. Diagram Analisis Kebutuhan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMP 3 Trienggadeng

a. Analisis Kebutuhan Melibatkan Peran serta Masyarakat dalam Membangun Kemitraan dengan Lembaga Lain yang Relevan pada Aspek Dunia Usaha

Berdasarkan analisis kebutuhan sekolah ditemukan bahwa sekolah perlu melibatkan peran DUDI dalam mendukung pengelolaan pendidikan sekolah. Dalam hal ini, Wakil Kepala Sekolah menyatakan bahwa usaha Socalate yang berada di jln. Banda Aceh-Medan, Musa Kabupaten Pidie Jaya sangat sesuai dengan kearifan lokal Pidie Jaya dalam membentuk sifat entrepreneur siswa. Untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pihak sekolah menyarankan bahwa kegiatan Sosialisasi, karya wisata dan Design Corel dan Movie Maker sangat sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan membentuk jiwa entrepreneur peserta didik

Sebagaimana yang dinyatakan Ani Retno Dumilah dan Ety Rahayu, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan jembatan penghubung untuk meningkatkan Kecakapan hidup (*lifeskill*) peserta didik. Kecakapan hidup diartikan sebagai kecapakan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problemahidup dan penghimpun secara wajar tanpa merasatertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mengatasinya.⁵²

b. Analisis Kebutuhan Melibatkan Peran Serta Masyarakat dan Membangun Kemitraan Lembaga Lain yang Relevan pada Aspek Bakat Mi

Sekolah juga perlu peran serta pihak lain pada aspek Bakat Minat dalam mendukung pengelolaan sekolah. Dalam hal ini pihak DISPORA sangat sesuai dengan kriteria sekolah untuk menyalurkan bakat dan minat pesertadidik SMPN 3 Trienggadeng.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak Dispora bidang olahraga yang meliputi Sepak Bola , *Volly Ball*, *Badminton*, dan Tenis Menja sangat diminati oleh peserta didik. Sehingga pihak sekolah menyarankan untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik melalui bidang olahraga tersebut dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak Dispora.

⁵²Ety Rahayu Ani Retno Dumilah, "Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Lifeskills) Sebagai Strategi Intervensi Dalam Perspektif Pembangunan Sosial Di Indonesia," *Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 2 (2020): 113–20, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/9250>.

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan setiap kegiatan olahraga. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas dan disiplin. Olahraga merupakan kegiatan yang dapat menyalurkan hobi dan mencukupi kepuasan fisik maupun fisik sehingga produktivitas kerja semakin meningkat.⁵³

Sabaruddin Yunis Bangun, menyatakan dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga sangat strategis untuk mengembangkan bakat dan minat olahraga peserta didik sehingga menumbuhkan karakter yang positif terhadap peserta didik.⁵⁴

Pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain adalah upaya sekolah untuk mengikutsertakan masyarakat dari berbagai elemen secara individu maupun kelompok (orang tua/komite sekolah/dunia usaha/lembaga pemerintah/organisasi masyarakat) dalam mendukung pelaksanaan program-program yang ada di sekolah. Dukungan bisa dalam bentuk gagasan, dana, sarana, kegiatan, dll yang memberi dampak terhadap peningkatan mutu/prestasi sekolah, misalnya peningkatan nilai, prestasi siswa

⁵³Raha Saifuddin Hamzah, "Efektifitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 Dispora Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar," no. 32 (2000).

⁵⁴Sabaruddin Yunis Bangun, "Peran Pelatih Olahraga Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Olahraga Pada Peserta Didik," *Jurnal Prestasi* 2, no. 4 (2019): 29, <https://doi.org/10.24114/jp.v2i4.11913>.

dalam bidang akademik dan non akademik, jumlah dan mutu sarana,dll serta berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah.⁵⁵

Dan berdasarkan Undang-undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2003, mutu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁶

Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dalam rangka mewujudkan undang-undang tersebut, maka perlu adanya suatu upaya kerjasama yang melibatkan masyarakat dan lingkungan sekolah secara optimal untuk membantu meningkatkan kualitas dan membangun kepercayaan yang baik terhadap masyarakat dan juga peran aktif dari masyarakat.⁵⁷

Sekolah harus mengupayakan sedemikian rupa, sehingga peserta didik memperoleh peluang yang optimal dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan peranannya. Salah satu upaya sekolah meningkatkan kualitas yaitu dengan melakukan kemitraan. Menurut Peraturan Menteri Kependidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relavan, berkaitan dengan

⁵⁵Badan Akreditasi Nasional Satuan Pendidikan, "INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN 2020 JENJANG SMP / MTs," 2020, 1–104.

⁵⁶Prayoga and Widad, "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah."

⁵⁷Farah Hatijah et al., "Peran Humas Dalam Membangun Kemitraan Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya," n.d.

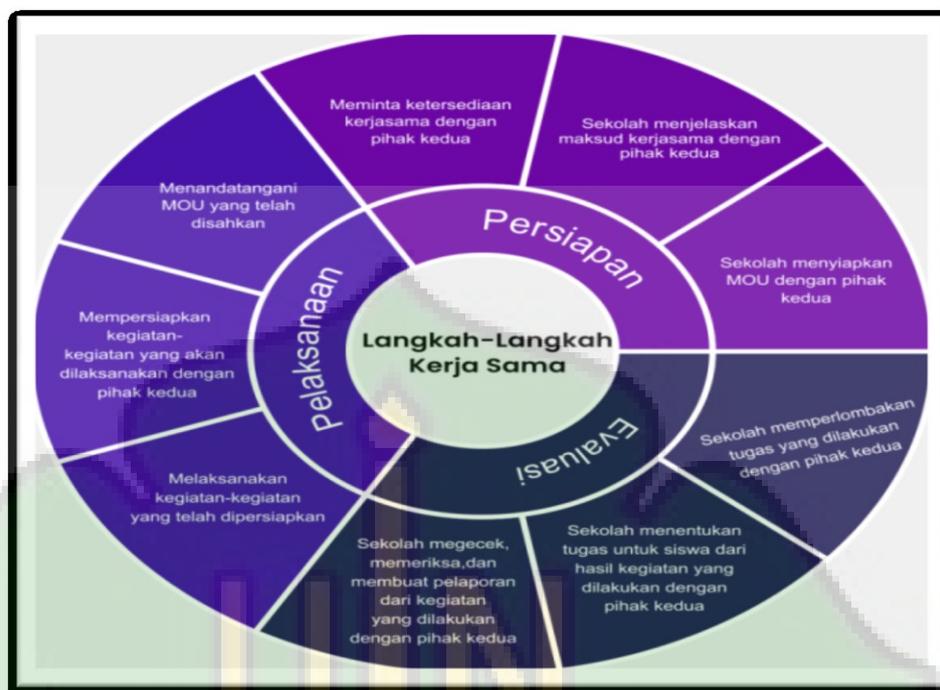
input, proses, output dan mamfaatan lulusan. Lembaga pendidikan boleh melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang relavan.⁵⁸

Dari penjelasan diatas jelas bahwa satuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan *stakeholder*. Adanya kerjasama satuan pendidikan sengan *stakeholder* dapat membangun satuan pendidikan yang lebih maju dikarenakan berbagai bantuan yang datang baik dari dukungan moral maupun material serta mendorong partisipasi aktif yang positif dari masyarakat terhadap satuan pendidikan.

2. Mengembangkan Langkah-Langkah Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu SMPN 3 Trienggadeng

Langkah-langkah yang dikembangkan dalam aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat pada pelibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan memenuhi standar pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah. Terdapat 3 aspek yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagaimana yang digambarkan dalam diagram berikut:

⁵⁸Sataloff, Johns, and Kost, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.”



Gambar 4.2. Aspek Langkah Kerjasama.

1. Melibatkan Peran Serta Masyarakat dan Membangun Kemitraan dengan Lembaga Lain yang Relevan pada Aspek DUDI

langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI (Socalate) pada komponen pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan adalah sebagai berikut :

No	Aspek	Pihak Sekolah		Pihak dan DUDI (Socalate)	
1	Persiapan	a	Pihak sekolah meminta kesedian kerjasama dengan pihak Socalate	a	Pihak Socalate menerima kesedian untuk bekerja sama dengan pihak sekolah
		b	Pihak sekolah memaparkan maksud dari kerjasama dengan pihak Socalate	b	Pihak Socalate menyetujui dan membarikan masukan tambahan atas kerjasama dengan pihak sekolah

		c	Pihak sekolah memberikan MoU yang merupakan pernyataan tertulis tentang kerjasama dengan pihak Socalate	c	Pihak Socalate menerima MoU yang merupakan bentuk kerjasama dengan pihak sekolah
2	Pelaksanaan	a	Pihak sekolah meminta pihak Socalate menandatangani MoU yang telah diberikan	a	Pihak Socalate Menandatangani MoU yang telah diberikan oleh pihak sekolah
		b	Pihak sekolah memberikan list kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pihak Socalate (Karya wisata, Sosialisasi, TweakBox)	b	Pihak Socalate menerima dan memberikan masukan tambahan list kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pihak sekolah (Sosialisasi, Karya Wisata, dan TweakBox)
		c	Pihak sekolah melaksanakan kegiatan yang telah dipersiapkan dengan pihak Socalate (Karya Wisata, Sosialisasi, TweakBox)	c	Pihak Socalate melaksanakan kegiatan yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah (Karya Wisata, Sosialisasi, TweakBox)
	Evaluasi	a	Pihak sekolah mengecek, memeriksa dan membuat laporan dari kegiatan yang dilakukan dengan pihak Socalate	a	Pihak Dispora menerima hasil laporan dari pihak Socalate

	b	Pihak sekolah memberikan tugas untuk siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan dengan pihak Socalate	b	Pihak Socalate menerima hasil tugas yang diberikan pihak sekolah kepada siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan
	c	Pihak sekolah memperlombakan tugas yang diberikan kepada siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan dengan pihak Socalate	C	Pihak Socalate menerima hasil tugas yang diperlombakan oleh pihak sekolah kepada siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan

Table 4.2. Tabel Langkah-Langkah Kerjasama dengan Pihak Socalate

2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat dan Membangun Kemitraan dengan Lembaga Lain yang Relevan pada Aspek Bakat Minat

Langkah-langkah kerjasama dengan pihak Bakat Minat (Dispora) pada komponen pelibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan disebutkan pada tabel dibawah :

No	Aspek	Pihak Sekolah		Pihak dan Bakat Minat	
1	Persiapan	a	Pihak sekolah meminta kesedian kerjasama dengan pihak Dispora	a	Pihak Dispora menerima kesedian untuk bekerja sama dengan pihak sekolah
		b	Pihak sekolah memaparkan maksud dari kerjasama dengan pihak Dispora	b	Pihak Dispora menyetujui dan membarikan masukan tambahan atas kerjasama dengan pihak sekolah

		c	Pihak sekolah memberikan MoU yang merupakan pernyataan tertulis tentang kerjasama dengan pihak Dispora	c	Pihak Dispora menerima MoU yang merupakan bentuk kerjasama dengan pihak sekolah
2	Pelaksanaan	a	Pihak sekolah meminta pihak Dispora menandatangani MoU yang telah diberikan	a	Pihak Dispora Menandatangani MoU yang telah diberikan oleh pihak sekolah
		b	Pihak sekolah memberikan list kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pihak Dispora (Sepak Bola, Volly Ball, Badminton, dan Tenis Meja)	b	Pihak Dispora menerima dan memberikan masukan tambahan list kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pihak sekolah (Sepak Bola, Badinton, Volly Ball dan Tenis Meja)
		c	Pihak sekolah melaksanakan kegiatan yang telah dipersiapkan dengan pihak Dispora (Sepak Bola, Volly Ball, Badminton, dan Tenis Meja)	c	Pihak Dispora melaksanakan kegiatan yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah (Sepak Bola, Volly Ball, Badminton, dan Tenis Meja)
	Evaluasi	a	Pihak sekolah mengecek, memeriksa dan membuat laporan dari kegiatan yang dilakukan dengan pihak Dispora	a	Pihak Dispora menerima hasil laporan dari pihak sekolah

	b	Pihak sekolah memberikan tugas untuk siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan dengan pihak Dispora	b	Pihak Dispora menerima hasil tugas yang diberikan pihak sekolah kepada siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan
	c	Pihak sekolah memperlombakan tugas yang diberikan kepada siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan dengan pihak Dispora	C	Pihak Dispora menerima hasil tugas yang diperlombakan oleh pihak sekolah kepada siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan

Table.4.3. Tabel Langkah-Langkah Kerjasama dengan Pihak Dispora

Sebagaimana pernyataan Isnaini Afrita Syari, kegiatan kerjasama pada dunia pendidikan tidak terlepas dari ilmu manajemen pendidikan dimana terdapat fungsi manajemen yakni POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).⁵⁹

Dan Rahcmat Satria dkk, menyatakan bahwa manajemen hubungan masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah secara internal maupun eksternal meliputi dimensi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pihak sekolah dalam merancang program-program sekolah.⁶⁰

Hubungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang sangat luas seperti hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik baik dalam rangka mendukung fungsi fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan kerjasama

⁵⁹Isnaini Afrita, Ali Imron, and Imron Arifin, "Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Industri Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Vokasional," *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 3 (2018): 313–19, <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p313>.

⁶⁰Satria et al., "Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Hubungan Masyarakat."

serta pemenuhan kepentingan bersama.⁶¹B. suryosubroto menyatakan, kerjasama merupakan suatu usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua pihak dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.⁶²

Hubungan kerjasama dikembangkan dengan prinsip saling membantu antara kedua pihak, khusus dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan didalam suatu lembaga. Pengembangan tersebut dapat dimulai dari pihak sekolah. Harus memiliki daftar nama industri yang terpercaya disekitarnya. Bukan hanya kepala sekolah, wali peserta didik juga harus dapat membantu mengatur sarana, personal dan jadwal kegiatan hubungan kerjasama antara keduanya. Sebaiknya terlebih dulu menyusun MoU (Memorandum of Understanding) secara formal dalam bentuk tertulis untuk kesepakatan kerjasama.⁶³

Strategi pelaksanaan kerjasama dapat dilihat dari 1) pengembangan hubungan kerjasama antara sekolah dan pihak yang bekerjasama dilaksanakan melalui koordinasi tugas dan tanggungjawab komite sekolah, 2) hubungan kerjasama dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan masing-masing pihak, 3) inisiatif pengembangan hubungan kerjasama harus dimulai dari pihak sekolah, terutama dalam membangun saling pengertian masing-masing pihak, 4) sekolah harus memiliki data yang lengkap dan akurat tentang pihak yang akan

⁶¹Khairuddin Azizah, Murniati AR, "Strategi Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Du / Di) Dalam Meningkatkan," *Administrasi Pendidikan* 3, no. 2 (2015): 148–58.

⁶²B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah* (Rieneka Cipta, 2004).

⁶³Afrita, Imron, and Arifin, "Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Industri Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Vokasional."

berkerjasama, 5) sekolah bersama komite sekolah harus mengatur sarana, personal dan jadwal kegiatan perkembangan hubungan kerjasama, dan 6) jalinan kerjasama antara sekolah dan pihak yang akan bekerjasama sebaiknya dibuat MoU secara formal dalam bentuk naskah kesepakatan kerjasama.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah kerjasama dengan pihak DuDi dan pihak Bakat Minat peneliti melihat perbedaan pendapat dalam langkah-langkah kerjasama tetapi tujuannya sama.

3. Menguji Validasi Langkah-Langkah Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di SMPN 3 Trienggadeng.

Penilaian terhadap hasil validasi yang diambil dari aspek penilaian oleh validator yaitu implementasi standar pengelolaan pendidikan pada komponen melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak lain yang relevan dengan melakukan kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat. Dalam proses penilaian oleh validator memberikan saran dan masukan perbaikan untuk langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat layak untuk digunakan. Hasil nilai rata-rata presentase dari 3 validator sebesar 93,7% dengan kriteria sangat baik (layak digunakan namun dengan revisi), dapat disimpulkan langkah-langkah kerjasama sudah dapat digunakan.

⁶⁴Azizah, Murniati AR, "Strategi Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Du / Di) Dalam Meningkatkan."

a. Respon Tenaga Kependidikan

Respon dilapangan dilakukan peneliti di SMPN 3 Trienggadeng melibatkan 3 orang tenaga kependidikan. Peran 3 tenaga kependidikan untuk memberikan penilaian terhadap langkah-langkah kerjasama yang dilakukan.

Peneliti melakukan penelitian sebanyak 2 kali pertemuan, di pertemuan pertama kegiatan yang dilakukan ialah menjelaskan permasalahan yang dimiliki peneliti, kemudian dipertemuan ke-2 menjelaskan langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan pihak lain yang relavan dengan melakukan kerjasama pada aspek DUDI dan pihak Bakat Minat dan juga kendala dalam implementasi standar pengelolaan pendidikan.

Implementasi standar pengelolaan pendidikan yang telah melalui serangkaian tahapan pengembangan seperti observasi, pembuatan langkah-langkah kerjasama, validasi, revisi, dan respon. Implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relavan dengan melakukan kerjasama pada aspek DUDI dan aspek Bakat Minat menarik untuk digunakan. Tidak hanya dilihat dari hasil kelayakan dan respon kemanerikan tenaga kependidikan, rancang bentuk langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan dilihat dari keefektifitasannya ini sangat efektif digunakan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Identifikasi masalah dalam implementasi standar pengelolaan pendidikan di SMPN 3 Trienggadeng ditemukan pihak sekolah belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan. Pihak sekolah hanya melakukan kerjasama dengan 4 kelembagaan antara lain ; 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) kepolisian, 4) keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga pihak sekolah perlu melibatkan pihak lainnya yaitu DUDI dan Bakat Minat untuk memenuhi standar pengelolaan pendidikan.
2. Langkah-langkah implementasi standar pengelolaan pendidikan pada komponen pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam melakukan kerjasama dengan pihak DuDi dan pihak Bakat Minat untuk meningkatkan mutu sekolah terbagi atas 3 aspek, pengembangan ini dilakukan dengan model pengembangan 4D, ketiga aspek langkah-langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat. Aspek pertama adalah persiapan yang meliputi pihak sekolah meminta ketersediaan kerjasama dengan pihak

kedua, pihak sekolah menjelaskan maksud kerjasama dengan pihak kedua, pihak sekolah menyediakan MoU untuk pihak kedua, selanjutnya aspek kedua adalah pelaksanaan yang meliputi pihak sekolah meminta pihak kedua menandatangani MoU yang telah disiapkan, pihak sekolah mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pihak kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan, dan aspek ketiga yaitu evaluasi yang meliputi sekolah mengecek, memeriksa, dan membuat laporan dari kegiatan yang dilakukan dengan pihak kedua, sekolah menentukan tugas untuk siswa dari hasil kegiatan yang dilakukan dengan pihak kedua, sekolah memperlombakan tugas yang dilakukan dengan pihak kedua.

3. Validasi rancang bangun langkah-langkah kerjasama pada aspek DUDI dan Bakat Minat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Hasil rata-rata persentase yang diperoleh 3 validator sebesar 93,7% dengan kriteria sangat baik (layak digunakan namun dengan revisi) dapat disimpulkan pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan pada aspek kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak kerjasama memenuhi standar pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sudah dapat digunakan.

Respon dari tenaga kependidikan terhadap implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan pada aspek kerjasama dengan pihak DuDi dan pihak Bakat Minat diperoleh nilai

rata-rata dengan skor presentase respon tenaga kependidikan terhadap bentuk rancang langkah-langkah kerjasama rata-rata skor sebesar 4 dimana $X > 3,25$ dengan kriteria “sangat baik”.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan ditemukan masih rendahnya akreditasi pada aspek DUDI dan Bakat Minat.
2. Oleh karena itu peneliti merancang bentuk langkah-langkah kerjasama pada aspek DUDI dan aspek Bakat Minat yang meliputi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Hasil validasi rancang bangun langkah-langkah standar pengelolaan pendidikan pada aspek DUDI dan aspek Bakat Minat di valid oleh para ahli dengan presentase sebesar 93,7% dengan kriteria “sangat layak digunakan dengan revisi”.
4. Hasil respon kemenarikan tenaga kependidikan terhadap rancang bangun langkah-langkah standar pengelolaan pendidikan DUDI dan pihak Bakat Minat diperoleh rata-rata 4 dimana $X < 3,25$ dengan kriteria sangat baik.
5. Maka rancang bangun langkah-langkah standar pengelolaan pendidikan pada aspek DUDI dan Bakat Minat dapat diterapkan di sekolah dalam hal mengobati akriditasi terhadap aspek tersebut serta untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
6. Bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan *action riset* terhadap penerapan bentuk rancang langkah-

langkah kerjasama dengan pihak DUDI dan pihak Bakat Minat pada pelibatan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan memenuhi standar pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan mutu disekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ridwan. *Manajemen Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Afrita, Isnaini, Ali Imron, and Imron Arifin. "Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Industri Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Vokasional." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 3 (2018): 313–19. <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p313>.
- Ali, Muhammad. *Metodelogi Dan Dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 20014.
- Ani Retno Dumilah, Ety Rahayu. "Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Lifeskills) Sebagai Strategi Intervensi Dalam Perspektif Pembangunan Sosial Di Indonesia." *Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 2 (2020): 113–20. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/view/9250>.
- Anwar, Herson. "Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): 15–27.
- Aziz, Amrullah. "Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Studi Islam Peningkatan Mutu* 10, no. 2 (2015): 1–14.
- Azizah, Murniati AR, Khairuddin. "Strategi Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Du / Di) Dalam Meningkatkan." *Administrasi Pendidikan* 3, no. 2 (2015): 148–58.
- Badan Akreditasi Nasional Satuan Pendidikan. "INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN 2020 JENJANG SMP / MTs," 2020, 1–104.
- Bangun, Sabaruddin Yunis. "Peran Pelatih Olahraga Ekstrakurikuler Dalam Mengembangkan Bakat Dan Minat Olahraga Pada Peserta Didik." *Jurnal Prestasi* 2, no. 4 (2019): 29. <https://doi.org/10.24114/jp.v2i4.11913>.
- BAPPEDA ACEH. "Kajian Analisis Mutu Pendidikan Aceh 2015," 2015.
- Cahyana, Ade. "Upaya Peningkatan Mutu Melalui Otonomi Satuan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16 (2010): 109–17. <https://media.neliti.com/media/publications/121594-ID-upaya-peningkatan-mutu-sekolah-melalui-s.pdf>.
- Dewi, Mera Putri, Sufyarma Marsyidin, and Ahmad Sabandi. "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Kompetensi Lulusan Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 144–52. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>.
- Djuanda, Isep. "Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Manajemen

- Berbasis Sekolah.” *Kordinat* 18, no. 1 (2019): 1–22.
- Gaspers Vincent. *Total Quality Control*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Goen, Anngun. “Standar Pengelolaan Pendidikan.” *Evaluasi* 1, no. 2 (n.d.).
- Hamzah, Raha Saifuddin. “Efektifitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 Dispora Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar,” no. 32 (2000).
- Haq, Muhammad Faisal. “Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah.” *Evaluasi* 1, no. 1 (2017): 26–41.
- Haryono, Budiyono, Istyarini, Wardi, and Apri Ardiantoro. “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.” *Jurnal Panjar* 1, no. 1 (2019): 17–22.
- Hatijah, Farah, Peran Humas, Dalam Membangun, Kemitraan Sekolah, Dengan Dunia, Usaha Dan, and Dunia Industri. “Peran Humas Dalam Membangun Kemitraan Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya,” n.d.
- Ismail, Feiby. “Implementasi Penjaminan Mutu Di Lembaga Pendidikan Islam ; Dan MAN 1 Kota Bitung.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14, no. 2 (2020): 78–95.
- Ismaya, Bambang. “Model Kepemimpinan Sekolah Berkarakter Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Bambang.” *Jurnal Pendidikan Unsika* 3 Nomor 1, no. Maret 2015 (2015): 97–108.
- Khaulani, Fatma, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Sabandi. “Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Terkait Standar Isi Di Sekolah Dasar.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 121–27. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>.
- Lucia, N. Eva. “Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Dalam Meningkatkan Prestasi Sekolah.” *Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan* 5, no. 1 (2017): 37–44.
- Majid, M. Syabri. “Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh.” *Jurnal Pemecahan* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.13170/jp.8.1.2040>.
- Moleong. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remeja Rosdakarya, 1996.
- Mulyasa, Dedi. *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*. Bandung: Remeja Rosdakarya, 2012.
- Nur, Muhammad. “Manajemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie” 4, no. 1 (2016): 5.

- Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. "Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia* 3, no. September (2007): 1–22.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN. "Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan." *Salinan*, 2015.
- Pratiwi, Enditiyas, and Muhsinah Annisa. "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan" 1 (2017): 210–16.
- Prayoga, Ari, and Azhar Lujjatul Widad. "Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah" 3, no. 1 (2019): 70–84.
- Primasari, Ika Firma Ningsih Dian, Arita Marini, and Mohamad Syarif Sumantri. "Analisis Kebijakan Dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 3, no. 2 (2020): 524–32.
- Purnama, B. "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah." *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY* 12, no. 2 (2016): 113839.
- Rohaniawati, Dede. "Penerapan Pendekatan Pakemuntuk Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Guru." *Tadris : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 1, no. 1 (2016): 52.
- Rosdiana, Fitriyani, and Uung Runalan Soedarmo. "Sistem Penjaminan Mutu Dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model Dan Sekolah Imbas." *Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 1–6.
- Sataloff, Robert T, Michael M Johns, and Karen M Kost. "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan." *BNSP, Paduan Satuan Nasional Pendidikan*, 2007, 1–50.
- Satria, Rachmat, Achmad Supriyanto, Agus Timan, and Maulana Amirul Adha. "Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Hubungan Masyarakat." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. September (2019): 199–207.
- Sonedi, Sonedi, Tutut Sholihah, and Dihasbi Dihasbi. "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru." *Anterior Jurnal* 18, no. 1 (2018): 13–22. <https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.436>.
- Suhaimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinek Cipta, 2006.
- Sujoko, Edi. "Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Berdasarkan Analisis Swot Di

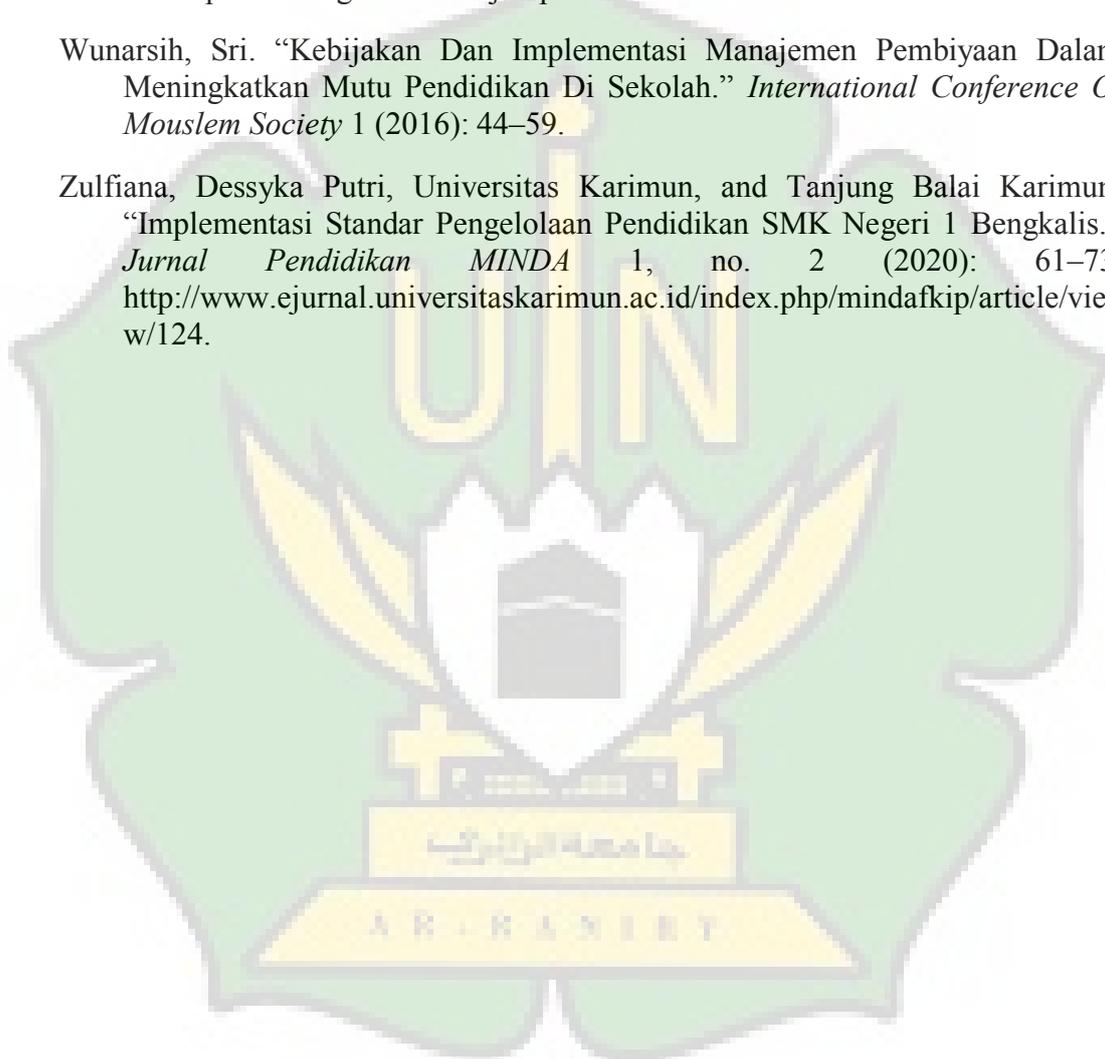
Sekolah Menengah Pertama.” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 83. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p83-96>.

Suryosubroto, B. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Rieneka Cipta, 2004.

Wulogening, Hiyasintus Ile, and Agus Timan. “Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Sistem Manajemen Perencanaan Kepala Sekolah.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2020): 137–46. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31282>.

Wunarsih, Sri. “Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah.” *International Conference Of Mouslem Society* 1 (2016): 44–59.

Zulfiana, Dessyka Putri, Universitas Karimun, and Tanjung Balai Karimun. “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis.” *Jurnal Pendidikan MINDA* 1, no. 2 (2020): 61–73. <http://www.ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/mindafkip/article/view/124>.



Lampiran1 : Angket validasi, wawancara dan ujicoba

**ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP LANGKAH-LANGKAH
IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PEINGKATAN MUTU DI SMP 3 TRIENGGADENG**

Nama Validator :

Hari/Tanggal :

Petunjuk pengesian :

1. Berikan tanda centang (✓) pada kolom dibawah ini untuk setiap item
2. Berikan penilaian anda berdasarkan keterangan berikut ;

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Tidak Baik
- 1 = Sangat Tidak Baik

Pengelolaan kegiatan kerjasama

Aspek	Criteria	Skor			
		1	2	3	4
Langkah persiapan	Kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan				
	kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan				
	Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU				
	Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan				

Langkah pelaksanaan	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan				
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholder</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah				
	Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan				
	Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan				
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refreasing yang mendidik				
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan				
	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan				
Langkah evaluasi	Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang				

	dilaksanakan				
	Evaluasi di lakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan				

3. Kesimpulan

Pengelolaan kegiatan kerjasama dalam peningkatan mutu :

- a. Layak digunakan tanpa revisi
- b. Layak digunakan dengan revisi
- c. Tidak layak digunakan

Komentar dan saran perbaikan secara umum

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2021

Vasidator

(.....)

NIP.

**ANGKET RESPON TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP LANGKAH-
LANGKAH IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN DALAM PEINGKATAN MUTU DI SMP 3
TRIENGGADENG**

Nama Validator :

Hari/Tanggal :

Petunjuk pengesian :

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom dibawah ini untuk setiap item
2. Berikan penilaian anda berdasarkan keterangan berikut ;

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Tidak Baik
- 1 = Sangat Tidak Baik

Pengelolaan kegiatan kerjasama

Aspek	Criteria	Skor			
		1	2	3	4
Langkah persiapan	Kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan				
	kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan				
	Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU				
	Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan				
Langkah	Langkah-langkah pelaksanaan				

pelaksanaan	kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan				
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholdor</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah				
	Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan				
	Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan				
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refreasing yang mendidik				
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan				
	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan				
Langkah evaluasi	Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan				

	Evaluasi di lakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan				
--	---	--	--	--	--

3. Kesimpulan

Pengelolaan kegiatan kerjasama dalam peningkatan mutu :

- d. Layak digunakan tanpa revisi
- e. Layak digunakan dengan revisi
- f. Tidak layak digunakan

Komentar dan saran perbaikan secara umum

.....

.....

.....

.....

....., 2021

Tenaga Kependidikan

(.....)

NIP.

Lampiran 2 : Instrumen Penelitian

Instrumen analisis Kebutuhan implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di SMP 3 Trienggadeng

VI. STANDAR PENGELOLAAN

81. Sekolah/madrasah memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan, meliputi: (1) perumusan, (2) keputusan, (3) penetapan, (4) peninjauan.

- A. Memenuhi 4 ketentuan
- B. Memenuhi 3 ketentuan
- C. Memenuhi 2 ketentuan
- D. Memenuhi 1 ketentuan
- E. Tidak sesuai ketentuan

82. Sekolah/madrasah telah merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai ketentuan, meliputi: (1) disusun sesuai rekomendasi hasil Evaluasi Diri, (2) diputuskan dalam rapat dewan pendidik, (3) disahkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, (4) dituangkan dalam dokumen tertulis.

- A. Memenuhi 4 ketentuan
- B. Memenuhi 3 ketentuan
- C. Memenuhi 2 ketentuan
- D. Memenuhi 1 ketentuan
- E. Tidak memenuhi ketentuan

83. Sekolah/madrasah memiliki pedoman pengelolaan yang meliputi: (1) KTSP, (2) kalender pendidikan/akademik, (3) struktur organisasi, (4) pembagian tugas guru, (5) pembagian tugas tenaga kependidikan, (6) peraturan akademik, (7) tata tertib, (8) kode etik, (9) biaya operasional.

- A. Memiliki 8-9 dokumen
- B. Memiliki 6-7 dokumen
- C. Memiliki 4-5 dokumen
- D. Memiliki 2-3 dokumen
- E. Kurang dari 2 dokumen

84. Sekolah/madrasah memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efektif, sesuai ketentuan, melalui langkah berikut: (1) diputuskan, (2) ditetapkan, (3) disosialisasikan, (4) disahkan.

- A. Memenuhi 4 ketentuan
- B. Memenuhi 3 ketentuan
- C. Memenuhi 2 ketentuan
- D. Memenuhi 1 ketentuan
- E. Tidak memenuhi ketentuan

85. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan.

- A. Melaksanakan 91%-100% kegiatan
- B. Melaksanakan 81%-90% kegiatan
- C. Melaksanakan 71%-80% kegiatan
- D. Melaksanakan 61%-70% kegiatan
- E. Melaksanakan kurang dari 61% kegiatan

revisi → pindah

86. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan yang meliputi: (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), (2) layanan konseling, (3) ekstrakurikuler, (4) pembinaan prestasi, (5) penelusuran alumni.

- A. Melaksanakan 5 atau lebih kegiatan
- B. Melaksanakan 4 kegiatan
- C. Melaksanakan 3 kegiatan
- D. Melaksanakan 2 kegiatan
- E. Melaksanakan kurang dari 2 kegiatan

87. Sekolah/madrasah melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran meliputi: (1) KTSP, (2) kalender pendidikan, (3) perangkat pembelajaran, (4) penilaian hasil belajar siswa, (5) peraturan akademik.

- A. Melaksanakan 5 atau lebih pengelolaan
- B. Melaksanakan 4 pengelolaan
- C. Melaksanakan 3 pengelolaan
- D. Melaksanakan 2 pengelolaan
- E. Melaksanakan kurang dari 2 pengelolaan

88. Sekolah/madrasah mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan, (2) pemberdayaan, (3) pengembangan dan promosi, (4) penghargaan.

- A. Melaksanakan 4 atau lebih pendayagunaan
- B. Melaksanakan 3 pendayagunaan
- C. Melaksanakan 2 pendayagunaan
- D. Melaksanakan 1 pendayagunaan
- E. Tidak melaksanakan pendayagunaan

89. Sekolah/madrasah melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2) keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4) pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam berbagai lomba.

- A. Melaksanakan 5 atau lebih penilaian
- B. Melaksanakan 4 penilaian
- C. Melaksanakan 3 penilaian
- D. Melaksanakan 2 penilaian
- E. Melaksanakan kurang dari 2 penilaian

18179

90. Sekolah/madrasah menyusun pedoman pengelolaan pembiayaan investasi dan operasional sesuai ketentuan: (1) disusun mengacu pada standar pembiayaan, (2) mengatur tentang sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana, (3) mengatur tentang penyusunan dan pencairan anggaran, (4) mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran, (5) mengatur tentang pembukuan.

- A. Memenuhi 5 ketentuan
- B. Memenuhi 4 ketentuan
- C. Memenuhi 3 ketentuan
- D. Memenuhi 2 ketentuan
- E. Memenuhi kurang dari 2 ketentuan

1. kesehatan
2. kepolisian
3. keagamaan dan kemasyarakatan
4. lingkungan
5. PPI - MPP - KAMI

91. Sekolah/madrasah melibatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan, antara lain lembaga: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) kepolisian, (4) keagamaan dan kemasyarakatan, (5) dunia usaha, (6) pengembangan minat dan bakat. - paskabca - kami.

- A. Bekerja sama dengan 6 atau lebih lembaga
- B. Bekerja sama dengan 4-5 lembaga
- C. Bekerja sama dengan 2-3 lembaga
- D. Bekerja sama dengan 1 lembaga
- E. Tidak bekerja sama

PPI pemusik atk. v. g. p. n. i. p. n. i.

Waka Humas - n. o. a.

92. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

- A. Melaksanakan sekali dalam 1 tahun
- B. Melaksanakan sekali dalam 2 tahun
- C. Melaksanakan sekali dalam 3 tahun
- D. Melaksanakan sekali dalam 4 tahun
- E. Melaksanakan sekali dalam lebih dari 4 tahun

AR-RANIBY

Waktu DANK - E-RKAM dan EDM -

EDM - Sinkron ke

3 standar

Evaluasi Dari Andran

93. Kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas kepemimpinan yang meliputi: (1) menjabarkan visi ke dalam misi, (2) merumuskan tujuan dan target mutu, (3) menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan, (4) membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan, (5) melibatkan guru dan komite, (6) meningkatkan motivasi kerja, (7) menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, (8) meningkatkan mutu, (9) memberi teladan.

- A. Melaksanakan 8-9 tugas
- B. Melaksanakan 6-7 tugas
- C. Melaksanakan 4-5 tugas
- D. Melaksanakan 2-3 tugas
- E. Melaksanakan kurang dari 2 tugas

94. Kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan sekolah/madrasah menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran, meliputi: (1) membangun tujuan bersama, (2) meningkatkan kreasi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum, (3) mengembangkan motivasi guru, (4) menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran, (5) mengembangkan sistem penilaian, (6) mengambil keputusan berbasis data.

- A. Menerapkan 6 prinsip
- B. Menerapkan 5 Prinsip
- C. Menerapkan 4 prinsip
- D. Menerapkan 3 prinsip
- E. Menerapkan kurang dari 3 prinsip

95. Sekolah/madrasah memiliki sistem informasi manajemen (SIM) yang meliputi: (1) pengelolaan SIM, (2) penyediaan fasilitas SIM, (3) penugasan pengelola SIM, (4) pelaporan data dan informasi.

- A. Memenuhi 4 komponen
- B. Memenuhi 3 komponen
- C. Memenuhi 2 komponen
- D. Memenuhi 1 komponen
- E. Tidak memiliki komponen

IASP -> matriks penilaian mutu

✓ e-RKAS
✓ Riset

- Smpatika
- Smpk
- e-madrasah
- e-Rkam

instrumen akred.

AN-NABEY

25. Butir Inti (Pelibatan Masyarakat)

Komponen: Manajemen sekolah / madrasah	Rumusan Pernyataan: Sekolah/madrasah melibatkan orang tua siswa, masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah.			
Sub-Komponen: Pelibatan Masyarakat	Capaian Kinerja			
Indikator: Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program sekolah/madrasah	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan sekolah/madrasah dengan melibatkan komite sekolah, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan <i>stakeholder</i> terkait dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan sekolah/madrasah dengan melibatkan komite sekolah, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan <i>stakeholder</i> terkait.	Sekolah/Madrasah melibatkan komite sekolah/madrasah dan orang tua siswa dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah/madrasah.	Sekolah/Madrasah belum melibatkan komite sekolah/madrasah, orang tua, masyarakat sekitar, dan <i>stakeholder</i> terkait dalam pengembangan program sekolah/madrasah.
Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen:				
Definisi Pelibatan masyarakat adalah upaya sekolah untuk mengikutsertakan masyarakat dari berbagai elemen secara individu ma kelompok (orang tua siswa/komite sekolah/dunia usaha/lembaga pemerintah/organisasi masyarakat) dalam mendukung pelaksanaan program-program yang ada di sekolah. Dukungan bisa dalam bentuk gagasan, dana, sarana, kegiatan dll.				
Pembuktian Kinerja:				
<ol style="list-style-type: none"> Menelaah dokumen berupa (1) MoU/kontrak kerja sama/berita acara/surat permohonan atau surat keterangan, yang menunjukkan adanya kerja sama atau keterlibatan dari pihak lain dalam program sekolah, (2) notulen rapat/kunjungan yang menunjukkan adanya pertemuan terkait dengan kegiatan kerja sama, (3) laporan kegiatan/berita acara/foto atau bentuk yang menunjukkan bukti keterlibatan pihak lain dalam program sekolah. Mengamati bukti-bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat (pihak lain) memberi dampak terhadap peningkatan mutu/prestasi sekolah. <i>Misalnya ada peningkatan nilai, prestasi siswa dalam bidang akademik dan non akademik, mutu kinerja guru, jumlah dan mutu sarana, dll.</i> Wawancara/FGD dengan komite sekolah, pengguna, dunia usaha, alumni dll. 				

Telaah Dokumen

Penelaahan dokumen terkait kegiatan sekolah/madrasah yang mengandung ide-ide kreatif dan inovatif.

Nama Dokumen	Deskripsi hasil telaah
Kebijakan dan program kerja sekolah yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat Bukti pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti undangan, daftar hadir, dokumentasi lainnya	

Telaah/Pedoman Wawancara

Penelaahan wawancara untuk mendapatkan informasi dan deskripsikan.

Aspek Wawancara	Deskripsi hasil wawancara				Siswa
	Kepala Sekolah/Wakasek	Guru	Tenaga kependidikan	Komite Sekolah/orang tua siswa	
Sejauhmana keterlibatan komite sekolah/madrasah, orang tua, masyarakat sekitar, dan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah/madrasah?					
Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelibatan mereka? lainnya					

**ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP LANGKAH-LANGKAH
IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PEINGKATAN MUTU DI SMP 3 TRIENGGADENG**

Nama Validator : Eva Nauli Taib M.Pd

Hari/Tanggal : 7 Juni 2021

Petunjuk pengisian :

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom dibawah ini untuk setiap item
2. Berikan penilaian anda berdasarkan keterangan berikut ;

- 4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Tidak Baik
1 = Sangat Tidak Baik

Pengelolaan kegiatan kerjasama

Aspek	Criteria	Skor			
		1	2	3	4
Langkah persiapan	Kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan			√	
	kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan			√	
	Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU			√	
	Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan				√
Langkah	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah sesuai			√	

pelaksanaan	dengan analisis kebutuhan				
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholdor</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah				√
	Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan			√	
	Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan				√
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refreasing yang mendidik			√	
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan				√
	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan			√	
Langkah evaluasi	Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan			√	
	Evaluasi di lakukan untuk melihat			√	

	kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan				
--	---	--	--	--	--

3. Kesimpulan

Pengelolaan kegiatan kerjasama dalam peningkatan mutu :

- g. Layak digunakan tanpa revisi
- h. Layak digunakan dengan revisi
- i. Tidak layak digunakan

Komentar dan saran perbaikan secara umum

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2021

Vasidator

(Handwritten Signature)
 (...Eva Nurul Huda, M.Pd)

NIP. 198204232011012010

**ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP LANGKAH-LANGKAH
IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PEINGKATAN MUTU DI SMP 3 TRIENGGADENG**

Nama Validator : Maria Ulva, S.Pd, M.Pd

Hari/Tanggal : 7 Juni 2021

Petunjuk pengisian :

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom dibawah ini untuk setiap item
2. Berikan penilaian anda berdasarkan keterangan berikut ;

4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Tidak Baik
1 = Sangat Tidak Baik

Pengelolaan kegiatan kerjasama

Aspek	Criteria	Skor			
		1	2	3	4
Langkah persiapan	Kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan				√
	kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan				√
	Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU				√
	Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan				√
Langkah	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah sesuai				√

pelaksanaan	dengan analisis kebutuhan				
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholdor</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah				√
	Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan				√
	Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan				√
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refreasing yang mendidik				√
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan				√
	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan				√
Langkah evaluasi	Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan				√
	Evaluasi di lakukan untuk melihat				√

	kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan				
--	---	--	--	--	--

3. Kesimpulan

Pengelolaan kegiatan kerjasama dalam peningkatan mutu :

- j. Layak digunakan tanpa revisi
- k. Layak digunakan dengan revisi
- l. Tidak layak digunakan

Komentar dan saran perbaikan secara umum

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2021

Vasidator

Maria Ulfa, S. Pd, M,Pd

(.....)

NIP.

**ANGKET RESPON VALIDATOR TERHADAP LANGKAH-LANGKAH
IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM
PEINGKATAN MUTU DI SMP 3 TRIENGGADENG**

Nama Validator : Mardhin

Hari/Tanggal : 30 Juni 2021

Petunjuk pengisian :

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom dibawah ini untuk setiap item
2. Berikan penilaian anda berdasarkan keterangan berikut ;

- 4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Tidak Baik
1 = Sangat Tidak Baik

Pengelolaan kegiatan kerjasama

Aspek	Criteria	Skor			
		1	2	3	4
Langkah persiapan	Kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan				√
	kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan				√
	Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU				√
	Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan			√	
Langkah	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah sesuai				√

pelaksanaan	dengan analisis kebutuhan				
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholdor</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah				√
	Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan				√
	Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan				√
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refresing yang mendidik				√
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan				√
	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan				√
Langkah evaluasi	Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan				√
	Evaluasi di lakukan untuk melihat				√

	kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan				
--	---	--	--	--	--

3. Kesimpulan

Pengelolaan kegiatan kerjasama dalam peningkatan mutu :

- m. Layak digunakan tanpa revisi
- n. Layak digunakan dengan revisi
- o. Tidak layak digunakan

Komentar dan saran perbaikan secara umum

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2021

Banda Aceh, 30 June, 2021

[Signature]
 Validator
[Signature]
 (.....)

Lampiran 6 : Olah Data keseluruhan hasil validasi

Aspek	Kriteria	V1	V2	V3	Σ skor	Σ xi	$\Sigma x/\Sigma xi$	Skor	kategori
Kualitas Isi	Kegiatan Kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
	Kerjasama dilakukan setelah mendapatkan kesedian dari pihak bersangkutan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
	Persiapan kerjasama sudah tertera dalam kontrak kerja/MOU	3	4	3	10	12	0,83	83	SB
	Kegiatan kerjasama yang dipersiapkan sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak bersangkutan	4	4	4	12	12	1	100	SB
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama sudah sesuai dengan analisis kebutuhan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
	Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholder</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah	4	4	4	12	12	1	100	SB

Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
Tahapan Pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan	4	4	4	12	12	1	100	SB
Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refresing yang mendidik	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk aspek dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan	4	4	4	12	12	1	100	SB
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB

Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
Evaluasi dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan	3	4	4	11	12	0,92	92	SB
Jumlah	1.219							
Persentase	93,7% (Sangat Layak)							



Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam keterlibatan <i>stakeholdor</i> dapat meningkatkan akreditasi sekolah	4	3	4	11	3,6	SB
Tahapan pelaksanaan kerjasama dapat dijalankan dengan mudah oleh sekolah dan pihak bersangkutan	3	4	4	11	3.6	SB
Tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama tidak melanggar kriteria Standar Pengelolaan Pendidikan	3	4	3	10	3.3	SB
Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai sarana refresing yang mendidik	3	4	4	11	3.6	SB

Pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk point dari pelibatan masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan	4	4	4	12	4	SB
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pihak yang bersangkutan	3	3	4	10	3.3	SB
Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	3	3	4	10	3.3	SB
Evaluasi dilakukan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan kerjasama yang dilakukan	4	4	4	12	4	SB

Lampiran 8 : Foto-foto penelitian

Gambar 1 : Pengisian angket validasi Oleh validator



Gambar 2 : pengisian angket validasi oleh guru



Gambar 1 : Pengisian angket validasi oleh Waka



Gambar 2 : Pengisian angket oleh Guru kepala sekolah



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-11406/Un.08/FTK/KP.07.6/10/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk Pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry; Banda Aceh
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang penetapan Institusi Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Manajemen Pendidikan Islam FTK UIN AR-Raniry Banda Aceh tanggal 6 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara:
1. Yusri M. Daud sebagai Pembimbing Pertama
2. Lailatussaadah sebagai Pembimbing Kedua

untuk membimbing Skripsi:

Nama : Furqanisah

NIM : 170 206 068

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di SMPN 3 Trieng Gading Pidie

KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap tahun Akademik 2020/2021

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi MPI FTK
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Rektor-
Dekan,

Muslim Razali



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-7992/Un.08/FTK/TL.00/04/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala SMP 3 Trienggadeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FURQANISAH / 170206068**

Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Pendidikan Islam

Alamat sekarang : Jl. Laksamana Malahayati Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu di SMP 3 Trienggadeng**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 April 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Agustus
2021

Dr. M. Chalis, M.Ag.



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 TRIENGGADENG

Alamat : Jln Peulandok Gp. Matang Kec. Trienggadeng Pidie Jaya Kode Pos 24185

Nomor : 421.3/ 052/SMP-2/2021
Lampiran :
Hal : Telah Melaksanakan Tugas Penelitian
Pada SMP Negeri 3 Trienggadeng

Trienggadeng, 12 Juni 2021

Kepala Yth
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat Nomor : B-7992/Un.08/FTK/TL.00/04/2021 Tgl 26 April 2021
,rihal mohon izin melakukan Penelitian Ilmiah pada SMP Negeri 3 Trienggadeng Kabupaten
Pidie Jaya, untuk penyusunan Skripsi,Maka dengan ini kami Sampaikan bahwa :

N a m a : Furqnisah
N I M : 170206068
Semester/Jurusan : VIII/Manajemen Pendidikan Islam.

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di SMP Negeri 3 Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya, Judul : *Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam
Peningkatan Mutu di SMP 3 Trienggadeng*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat atas kerjasama yang baik, untuk dapat dipergunakan
seperlunya .



Kepala Sekolah

MUSRI, S Pd

NIP.19611231 198403 1 023